

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI**

**TPA TAMANGAPA**



Oleh :

**RIO**

**Nomor Induk Mahasiswa : 105641109020**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA**

**TAMANGAPA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



Disusun dan Diajukan Oleh :

**RIO**

Nomor Induk Mahasiswa : 105641109020

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah  
Di TPA Tamangapa  
Nama Mahasiswa : RIO  
Nomor Induk Mahasiswa : 105641109020  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Taufik, S.IP., M.AP


Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP

Mengetahui

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Hj. Hiyah Majik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730727

  
Ahmad Harakan S.IP., M.H.I  
NBM. 1207163

### HALAMAN PENERIMAAN TIM

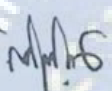
Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0290/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari selasa, Tanggal 16 Agustus 2024



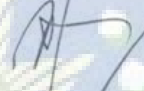
Mengetahui

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730727



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM. 992797

Tim Penguji

1. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si (  )
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si (  )
3. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP (  )
4. Hardianto Hawing, ST, MA (  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama Mahasiswa : RIO

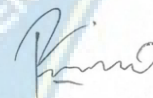
Nomor Induk Mahasiswa : 105641109020

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Januari 2024

Yang Menyatakan,



RIO

## ABSTRAK

### **Rio, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa(Dibimbing Oleh Ahmad Tufik, dan Nursaleh Hartaman)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, dengan menggunakan teori George C. Edward III. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah bergantung pada komunikasi yang efektif, struktur birokrasi yang efisien, dan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun berbagai inisiatif telah diterapkan, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan pemilahan sampah, tantangan signifikan masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya fasilitas memadai, dan masalah kesadaran masyarakat. Struktur birokrasi yang fleksibel dan transparan, serta koordinasi yang baik antara lembaga, sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Evaluasi menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Makassar.

**Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sampah, Dampak Lingkungan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

1. Penulis Panjatkan rasa Syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa”
2. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak lain. tentunya dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat adanya masukan, bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :
4. Orang Tua Saya Rustam dan Marda yang selalu senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta semangat baik dalam bentuk moril maupun

materil. Serta segenap keluarga besar saya yang selalu memberi penyemangat dan bantuan terhadap proses penyusunan

5. Bapak Ahmad Tufik, S.IP., M.AP selaku pembimbing I dan Bapak Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP selaku pembimbing II saya senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
6. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ibu Nur Kaerah, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis dari mulai awal perkuliahan berlangsung.
9. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi ini.
10. Ucapan Terimakasih Untuk Dewan senior dan Seluruh Keluarga Besar HIMJIP FISIP UNISMUH Makassar dan teman-teman seperjuangan di dalam periode yang menjadi keluarga kedua selama saya di Makassar
11. Ucapan Terimakasih kepada Ira Riswana S.I.Kom yang telah memberikan dukungan dan dorongan juga banyak meluangkan waktunya untuk kebersamai penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



12. Ucapan Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan saya pada member (SASIGA) Kevin, Muhammad Angga, Muhammad Rifky, Muhammad ric brian, Vicky, Ikhlasul Amal Yunus, Nauval Zaky, Mursidin Rahmat serta teman-teman angkatan 2020 yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, doa dan dukungan selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-persatu.

Makassar 12 Agustus 2024



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Konsep dan Teori .....	14
C. Kerangka Pikir .....	26
D. Fokus Penelitian .....	26
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29

B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Pengabsahan Data .....	32
G. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian.....	39
C. Pembahasan.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi sampah.....	6
Tabel 3.1 Informan .....	32
Tabel 4.1 Penduduk Kelurahan TPA .....	39
Tabel 4.2 Data Volume Sampah TPA .....	39



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	28
Gambar 4.1 Sturur Birokrasi Pengolaan Sampah.....	37
Gambar 4.2 Struktural Kepegawaian UPT TPA Tamangapa.....	38



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah merupakan masalah global yang kompleks dan semakin meningkat di banyak negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan konsumsi merupakan faktor terpenting yang meningkatkan produksi sampah. Koordinasi global dan langkah-langkah komprehensif dari awal hingga akhir rantai pengelolaan sampah diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai negara dengan polusi tinggi, Indonesia harus memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah (Hadamuan & Tuti, 2022).

Limbah sampah merupakan hasil produksi yang dihasilkan setiap harinya oleh rumah tangga maupun industri. Tidak ada cara bagi manusia untuk menghindar dari adanya limbah sampah ini, baik itu di lingkungan rumah, di tempat kerja, atau di lokasi lainnya. Masalah timbul ketika limbah tidak dikelola dengan baik dalam hal penanganan dan pengelolaannya. Dampak dari kurangnya penanganan limbah meliputi aroma tidak sedap di kota, keindahan yang terganggu, dan risiko penyebaran penyakit (Mahin, 2022).

Isu sampah merupakan permasalahan kompleks yang memberikan beban signifikan kepada Pemerintah Kota dan warganya. Sampah hingga saat ini tetap menjadi masalah nasional yang belum ditemukan solusi optimal, bahkan

cenderung menjadi permasalahan berkelanjutan setiap tahunnya jika tidak dikelola dengan efektif. Pertambahan jumlah penduduk secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan . Namun, jika limbah dikelola dengan baik melalui proses penanganan dan pengelolaan yang efektif, hasilnya akan menciptakan kota yang bersih dan menarik. Selain itu, pemanfaatan kembali barang yang tidak digunakan lagi dapat dilakukan dengan metode pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan ke tahap pemrosesan akhir. Tujuannya adalah agar barang yang sebelumnya dianggap tidak memiliki nilai dapat diolah kembali dan dimanfaatkan. (Danna & Kismartini, 2021)

Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Daerah No. 23 Tahun 2014. Meskipun pemerintah kota mempunyai kewenangannya masing-masing, namun tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, penting untuk mengubah persepsi sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan keuntungan. Pengolahan dan pembuangan sampah harus menjadi langkah nyata dalam pengelolaan sampah, dengan pendekatan edukasi masyarakat dalam

pemilahan, seleksi dan pemulihan sampah serta pengembangan perekonomian masyarakat melalui bank sampah. Pengetahuan, sikap dan keterampilan warga dalam bidang pengelolaan dan daur ulang sampah juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di Kota Makassar yang mengalami peningkatan jumlah penduduk yang luar biasa dan permasalahan terkait pengelolaan sampah (Okhtafianny & Ariani, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sampah di Bank Sampah, Bank Sampah merujuk pada fasilitas pengelolaan sampah yang mematuhi prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 3R adalah konsep pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan cara yang lebih bijak dalam penggunaan sumber daya. Reduce berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, misalnya dengan memilih produk yang lebih tahan lama dan menghindari barang sekali pakai. Reuse mengajak kita untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai, seperti menggunakan botol atau wadah untuk tujuan lain. Recycle adalah proses mendaur ulang barang bekas menjadi produk baru, mengurangi kebutuhan bahan mentah dan volume sampah. Dengan mengadopsi 3R, kita bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi limbah.



Bank Sampah bertindak sebagai alat untuk memberikan edukasi, mengubah perilaku dalam mengelola sampah, dan menerapkan ekonomi sirkular. Fasilitas ini dibentuk dan dijalankan oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Bank Sampah juga merupakan salah satu metode dalam Gerakan Nasional Kebersihan yang sedang dipromosikan oleh pemerintah. (Anugerah & Yahya, 2022)

Pengelolaan sampah di Kota Makassar sebagai salah satu kota Metropolitan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kemudian pada pasal 11 ayat 2 (b) disebutkan bahwa pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah. Dan pada pasal 31 ayat 1 disebutkan Pemerintah Kota dapat bermitra dengan Badan Usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah (Fadliah et al., 2021)

Pembuangan limbah campuran memiliki potensi untuk merusak dan mengurangi nilai bahan yang sebenarnya dapat dimanfaatkan kembali. Bahan organik dapat mencemari dan mengkontaminasi bahan yang

seharusnya dapat didaur ulang, sementara zat beracun dapat menghambat kemungkinan penggunaannya. Proses pengelolaan sampah menjadi lebih rumit dengan perubahan paradigma masyarakat, yang sebelumnya hanya terfokus pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, untuk beralih ke praktik pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle) (SILAM, 2023)

Pemahaman masyarakat Indonesia terkait pentingnya daur ulang sampah masih perlu ditingkatkan. Produk yang rusak, barang yang tidak terpakai, kemasan produk, dan sisa makanan yang dibuang cenderung menumpuk di tempat pembuangan sampah, sementara sebagian lainnya berserakan di jalan atau mengapung di Sungai (Iqbal et al., 2022).

Kota Makassar, seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas urban, mengalami peningkatan volume sampah yang signifikan. Kepadatan penduduk dan kegiatan industri di kota ini menyebabkan meningkatnya produksi sampah. Meskipun Kota Makassar memiliki infrastruktur pengelolaan sampah, namun kemampuan dan efektivitasnya dapat menjadi perhatian. Ketersediaan tempat pembuangan akhir (TPA) dan sistem pengumpulan sampah yang efisien menjadi faktor penting untuk dioptimalkan. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting. Program partisipatif, seperti bank sampah dapat membantu menciptakan kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap masalah sampah. Beberapa inisiatif berkelanjutan mungkin sudah

diimplementasikan di Kota Makassar, seperti program pengelolaan sampah berbasis teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau kerja sama dengan sektor swasta dalam mencari solusi inovatif (Pemikiran et al., 2023).

Untuk mengatasi masalah produksi sampah yang sangat besar, langkah-langkah pencegahan yang serius perlu diterapkan. Sampah merupakan penyebab utama pencemaran lingkungan, yang dapat merusak ekosistem. Salah satu metode penanganan sampah tradisional yang masih umum digunakan saat ini adalah metode "kumpul-angkut-buang". Banyaknya sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menyebabkan kondisi TPA semakin memburuk dari waktu ke waktu. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan lahan untuk pembentukan TPA baru (Abdussamad et al., 2022).

Tabel 1.1. Komposisi Sampah Kota Makassar

No	Komposisi Sampah	Volume (M <sup>3</sup> )
1	<b>Sampah Organic</b>	<b>2.135,51</b>
2	<b>Plastik</b>	<b>264,69</b>
3	<b>Kaleng, besi, metal, aluminium</b>	<b>41,77</b>
4	<b>Karet ban</b>	<b>16,40</b>
5	<b>Kaca</b>	<b>44,90</b>
6	<b>Kayu</b>	<b>442,23</b>
7	<b>Lain-lain</b>	<b>480,20</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>3,904,05</b>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa sampah organik adalah terbanyak 2.135,51 m<sup>3</sup> atau sebesar 54,70%. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat sejahtera dimasa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan yang sehat. Dari aspek persampahan maka kata sehat berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik, sehingga bersih dari lingkungan (Muhlis et al., 2022).

Sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar meliputi pengumpulan, pengangkutan dan berakhir di TPA Tamangapa. TPA Tamangapa sebagai Tempat pemrosesan akhir sampah masih menggunakan metode Open Dumping dalam pengoperasian TPA. Sampah di Kota Makassar menjadi masalah yang belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan belum ditemukan solusi jangka panjang yang tepat.

Kebijakan mengenai pengelolaan persampahan di Kota Makassar telah dijelaskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Selain itu, peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011. Meskipun terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang persampahan, penanganannya tidak selalu selesai sepenuhnya sesuai harapan pemerintah kota dan masyarakat (Haerul et al., 2016)

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada dan merupakan tanggung jawab pemerintah kota, Walikota Kota Makassar mengambil

inisiatif dengan membuat kebijakan berupa program untuk menangani masalah kebersihan yang dikenal dengan slogan "Makassar Tidak Rantasa" (MTR). Program ini diperkenalkan pada tanggal 15 Juni 2014 dalam acara Akbar A'bbulo Sibatang Lompoa di Celebes Convention Centre (CCC) Jalan Metro Tanjung Bunga. MTR merupakan salah satu program inovatif dari Walikota Makassar yang diharapkan dapat melibatkan partisipasi aktif warga Kota Makassar dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membangun rasa bangga sebagai warga Kota Makassar yang bersih dan beradab (Tempat et al., 2023)

Di Kota Makassar, implementasi kebijakan Bank Sampah diterapkan melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2014 yang membahas pembentukan UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar. UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang didirikan sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2014, yang bertugas sebagai pusat Bank Sampah di Kota Makassar. (Safitri, 2023)

Kegagalan masyarakat dalam menjaga lingkungannya menjadikan lingkungan menjadi kurang bersih dan sehat. Begitu pula dengan masyarakat Kota Makassar yang juga mencemari lingkungan perkotaan. Selain itu, peran serta masyarakat luas juga sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena permasalahan tersebut saling

berkaitan. Permasalahan yang timbul dalam program pengelolaan sampah adalah masih belum adanya kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah yang dapat dikelola dengan baik. Program pengelolaan sampah juga dapat menjadi solusi dari persoalan terjadinya banjir saat musim hujan.

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu;

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah Di Tpa Tamangapa

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Secara Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat menjadi sebuah karya yang dijadikan sebagai referensi dalam memperkaya ilmu yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa.

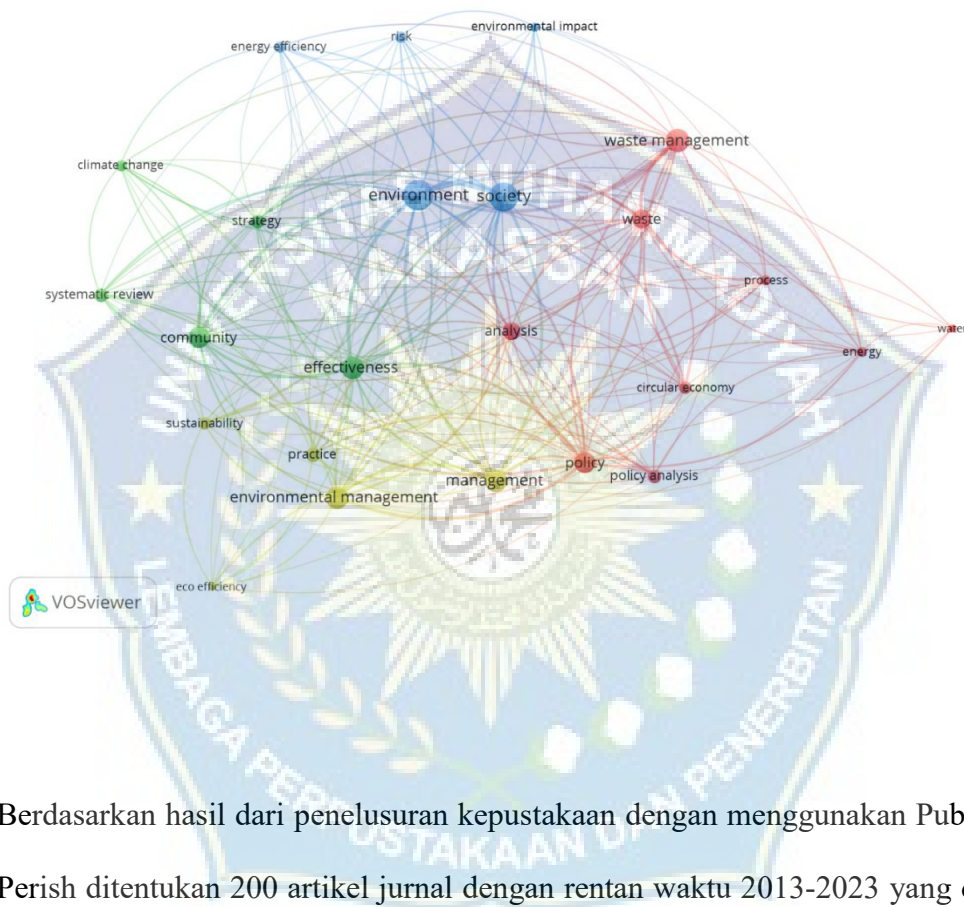
##### 2. Secara Praktis

Bagi masyarakat sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa. Teknologi telah mendorong munculnya praktik jurnalistik yang berjalan secara otomatis dengan memanfaatkan metode komputer dan *Artificial Intelligence (AI)* dalam proses produksi media. Fenomena ini sering disebut sebagai "Robot Jurnalistik", di mana *AI* mampu menghasilkan konten berita dalam jumlah besar tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Lokadata.ID adalah salah satu media yang menggunakan *AI* dalam produksi berita, baik dalam bentuk konten yang dihasilkan sepenuhnya oleh robot jurnalistik maupun dalam kombinasi dengan peran manusia (Indainanto, 2020).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu



Berdasarkan hasil dari penelusuran kepustakaan dengan menggunakan Publish Or Perish ditentukan 200 artikel jurnal dengan rentang waktu 2013-2023 yang dimana artikel-artikel tersebut berkaitan erat dengan kata kunci Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa. Artikel-artikel ini kemudian dikelola menggunakan vosviewer untuk menentukan

posisi proyek penelitian dari peneliti. Diantaranya penelitian yang membahas tentang Masyarakat Lingkungan Hidup. Ada beberapa penelitian tentang



masyarakat Lingkungan Hidup, penelitian yang berfokus tentang Pemberitaan dan Persepsi Masyarakat Tentang Lingkungan Hidup di Media Cetak Lokal Provinsi Kalimantan Timur (Fitriyarini N Nurliah, 2013), dan ada juga yang membahas tentang dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara (Listiyani, 2017).

Selain itu ada juga yang membahas tentang pengelolaan sampah, penelitian yang berfokus tentang Salah satu permasalahan di dalam kawasan pantai atau pesisir adalah pengelolaan sampah. Sampah dapat menimbulkan permasalahan lingkungan apabila keberadaannya tidak tertangani dengan baik. Tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui berbagai jenis sampah dan bagaimana cara pengelolaannya. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini mengutamakan makna dari informasi yang diperoleh, meliputi data kondisi eksisting daya tarik wisata kawasan pantai dan data terkait pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan dikawasan pantai ada 2 jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik, sampah organik yang dihasilkan berupa sampah-sampah dari alam seperti dedaunan, ranting-ranting dan ada sebagian sisa-sisa makanan yang telah dikonsumsi. Sedangkan untuk sampah anorganik yaitu seperti. Kaleng minuman, plastik, dan lain sebagainya yang tidak bisa terurai. Untuk pengelolaan sampah sendiri dapat di olah seperti membedakan jenis sampahnya, sampah anorganik dapat diolah kembali atau didaur ulang dan hasilnya dapat di jual lagi dengan kemasan yang berbeda (Syalwa Jayantri & Agung Rido, 2021), dan ada juga yang membahas tentang Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan pengelolaan sampah masyarakat di Kota Ambon. Metode

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan random sampling kepada 87 responden penelitian. Kesimpulan penelitian adalah (1). indikator sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Pemerintah Kota Ambon belum insentif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. (2). Indikator kualitas pelayanan sarana dan prasarana masyarakat menilai belum maksimal Pemerintah Kota menyiapkan kualitas tempat pembuangan sampah di Kota Ambon (Wance, 2022). Dan ada juga yang membahas tentang Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat di Kota Ambon yang berfokus Kota Manado adalah kota dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, hal tersebut menyebabkan Pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, semakin bertambahnya pertumbuhan dan penyebaran penduduk dan aktifitas masyarakat pada satu kawasan maka bertambah pula volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dalam hal ini masalah sosial yang timbul dalam masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan masyarakat pada satu kawasan adalah pengelolaan dibidang kebersihan lingkungan yang salah satunya adalah terkait masalah sampah. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam mewujudkan Kota Manado yang bersih salah satunya yaitu pengelolaan kebersihan dengan benar dan baik. Objek yang dikelola dalam pengelolaan kebersihan adalah sampah. Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado dibutuhkan peran serta masyarakat sehingga mengurangi beban dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dan terakhir penegakan hukum kurang maksimal. Pemerintah kota manado harus mempunyai program atau tujuan khusus dalam kebijakan pengelolaan sampah di kotamanado. Hal ini di jabarkan dan meningkatkan visi dan misi pemerintah kota manado dan demi terwujudnyaharapan kotacerdas (Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, 2019)

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Masyarakat Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah belum ada yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa.

## **B. Konsep dan Teori**

### **1. Kebijakan Pemerintah**

Menurut Ealau dan Kenneth Prewithh yang dikutip Charles O. Jones dalam Suharno, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang. baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (a standing

delusion characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it) (Arifah, 2018)

Menurut Anderson (Wahab, 2008), istilah politik sendiri mengatakan: “Politik adalah perilaku beberapa aktor (pejabat, kelompok, lembaga pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.” Menurut Hasswell dan Kaplan (Rusli, 2015), “politik adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik yang dipandu.” Setiap kebijakan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuannya, oleh karena itu Metter dan Horn (Agustino, 2008) menyatakan: “Implementasi kebijakan adalah tindakan individu/pemerintah atau sektor swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan politik.” (Komarudin et al., 2023).

Definisi kebijakan publik yang diutarakan oleh Thomas R. Dye, seperti yang dikutip oleh Nugroho (2017: 204), mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, alasan di balik tindakan tersebut, dan dampak yang dihasilkan yang memengaruhi kehidupan bersama. Dalam pandangan ini, peran pemerintah dianggap sangat penting dalam seluruh proses kebijakan publik, termasuk perumusan kebijakan, implementasi, dan hasil akhirnya. Pentingnya pemerintah dalam konteks kebijakan publik juga ditegaskan oleh Prof. Michael Porter, seperti yang disebutkan oleh Nugroho (2017: 4). Efektivitas suatu pemerintahan dianggap sebagai faktor penentu dalam mencapai hasil yang diinginkan dari kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintahan

yang efektif dianggap krusial untuk mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan dalam kehidupan bersama. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hanya mencakup perumusan aturan atau undang-undang, tetapi juga melibatkan implementasi kebijakan tersebut dan dampak yang dihasilkan dalam membentuk pola hidup masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki dampak luas dan kompleks pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah (Fitri et al., 2020).

Demikian pula definisi yang pernah dikemukakan oleh Wilson (dalam Solichin Abdul Wahab, 2015: 13) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah, mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/ sedang diambil (gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).” Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan public itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuannasional; 2)

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-citasudah ditempuh.

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), dalam artian dia mempunyai cirri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis 4 Analisis Kebijakan Publik lain. (Solichin Abdul Wahab, 2015: 18). Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton (dalam Solichin Abdul Wahab, 2015: 18) disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (public authorities) (Meutia, 2017).

## 2. Analisis Kebijakan

kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan atau arah tindakan yang diusulkan oleh berbagai aktor, baik individu, kelompok, maupun pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu. Pendekatan ini mencakup beberapa dimensi yang luas, termasuk bidang kegiatan, proposal konkret, kewenangan formal, program, serta keluaran atau output yang dihasilkan.

kebijakan publik sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai elemen, termasuk aktor-aktor yang terlibat, tujuan yang ingin dicapai, tindakan konkret yang diusulkan, serta output atau hasil dari kegiatan

tersebut. Dalam konteks penelitian Anda tentang Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar, Anda dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk memahami dan menganalisis kebijakan yang ada serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat (Alam, 2019)

Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan sampah di Kota Makassar menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola sampah. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dalam mengelola sampah

Menurut William N. Dunn (2000), analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu analisis kebijakan prospektif, retrospektif, dan terintegrasi:

a. Analisis Kebijakan Prospektif: Analisis ini dilakukan sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Biasanya melibatkan produksi atau transformasi informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Para ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi sering terlibat dalam jenis analisis ini. Namun, terkadang terdapat jurang yang besar antara solusi yang diusulkan oleh analisis ini dan implementasi nyata oleh pemerintah.

b. Analisis Kebijakan Retrospektif: Analisis ini dilakukan setelah aksi kebijakan telah dilakukan. Melibatkan penciptaan dan transformasi informasi berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari kebijakan yang



telah dilaksanakan. Tiga kelompok analisis yang terlibat dalam jenis analisis ini adalah kelompok berorientasi disiplin, kelompok berorientasi masalah, dan kelompok berorientasi aplikasi.

c. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi: Analisis ini menggabungkan pendekatan dari analisis kebijakan prospektif dan retrospektif. Ini mencakup penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan setelah tindakan kebijakan diambil. Para praktisi yang terlibat dalam analisis ini tidak hanya mengaitkan tahapan penyelidikan retrospektif dan prospektif, tetapi juga terus menerus menghasilkan dan mengubah informasi secara dinamis.

Analisis kebijakan yang terintegrasi menekankan pentingnya keterlibatan analisis dalam seluruh siklus kebijakan, dari perencanaan hingga evaluasi. Ini memungkinkan untuk penyesuaian yang lebih baik antara teori dan praktik serta memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan aktual masyarakat.

Dalam analisis kebijakan yang terintegrasi, analisis terlibat dalam transformasi komponen-komponen informasi kebijakan secara berulang-ulang sepanjang waktu, seperti perputaran jarum jam. Pendekatan ini memungkinkan untuk menemukan pemecahan masalah kebijakan yang memuaskan. Analisis ini memiliki kelebihan yang dimiliki oleh metode analisis retrospektif dan prospektif, tanpa memiliki kelemahan dari kedua metode tersebut.



Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus menerus, analisis yang terintegrasi memberikan informasi yang lebih kaya dan relevan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Hal ini berbeda dengan analisis prospektif dan retrospektif yang cenderung memberikan informasi yang lebih terbatas dalam konteks kehidupan sosial. Dengan demikian, pendekatan terintegrasi ini memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan penyesuaian yang lebih baik terhadap dinamika masyarakat (Haerul et al., 2016)

### 3. Pengelolaan Sampah

Menurut Notoatmodjo (2007), pengelolaan sampah mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan, atau pengolahan sampah dengan tujuan untuk mencegah dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sejati (2009) juga menyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengolah sampah mulai dari tahap timbulan hingga tahap pembuangan akhir

Menurut Sejati (2009), pengelolaan sampah adalah rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengelola sampah dari tahap timbulan hingga tahap pembuangan akhir. Dalam konsep ini, pengelolaan sampah melibatkan serangkaian proses atau langkah-langkah yang dimulai dari awal pembentukan sampah hingga tahap akhir di mana sampah tersebut dibuang atau diolah secara tepat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pengumpulan, transportasi, pengolahan, dan pembuangan sampah. Dengan kata lain, pengelolaan sampah menurut Sejati adalah serangkaian kegiatan terintegrasi yang bertujuan untuk merancang solusi terhadap permasalahan sampah dari awal hingga akhir siklusnya (Putra & Ismaniar, 2020).

Menurut Sularso (2011), pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalkan dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sampah menurut Sularso mencakup upaya perencanaan dan pelaksanaan strategi yang holistik untuk menangani masalah sampah dengan memperhatikan aspek-aspek perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pendekatan ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan sampah bukan hanya mencakup aspek fisik seperti pengumpulan dan pengolahan, tetapi juga aspek manajerial dan perencanaan untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan (Hansyar & Halimah, 2022).

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mengurangi dan mengolah sampah. Dengan adanya bantuan pengelolaan sampah maka permasalahan pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah dapat teratasi dengan baik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah mencakup dua aspek utama. Pertama, pengurangan sampah yang meliputi pengurangan sampah, daur ulang sampah, dan pemulihan sampah. Dengan cara ini, timbulan sampah dapat dikurangi semaksimal mungkin dan sampah yang dihasilkan dapat digunakan kembali untuk mengurangi beban lingkungan. Kedua, pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan akhir. Proses ini meliputi pengelompokan dan pemilahan sampah berdasarkan jenis, jumlah dan sifatnya, dilanjutkan dengan pengumpulan dan pemindahan sampah dari tempat asal ke fasilitas penyimpanan atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Kemudian, limbah tersebut diolah untuk mengubah karakteristik, komposisi dan kuantitasnya, sebelum akhirnya dibuang secara aman dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah merupakan kunci penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan lestari serta menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari (Danang Aji Kurniawan & Ahmad Zaenal Santoso, 2021).

Penelitian ini menggunakan Teori yang disampaikan oleh George Edwards III (Hessel 2003:12) menandai pendekatan ini digunakan untuk penelitian terapan kebijakan atau program mempertimbangkan empat faktor menerapkan kebijakan tersebut umum, yaitu:

a. Komunikasi

b. Sumber Daya

c. Sikap Disposisi

d. Struktur Birokrasi

4. implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan, menurut Van Horn dan Van Meter seperti yang dikutip oleh Wahab dalam (Mokodompis et al., 2019), dapat dijelaskan sebagai proses tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok dari pemerintah atau sektor swasta. Tindakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan sampah di Kota Makassar telah dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pembangunan fasilitas pengolahan sampah, kampanye kesadaran masyarakat, serta pengembangan program bank sampah (Tempat et al., 2023)

Implementasi kebijakan publik adalah proses administratif yang dilakukan setelah kebijakan telah ditetapkan atau disetujui. Proses ini terjadi di antara tahap perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, terdapat pendekatan logika yang bersifat top-down, yang berarti merinci atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih bersifat abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sebaliknya, formulasi kebijakan menggunakan pendekatan bottom-up, yang dimulai dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, yang kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Perubahan pola konsumsi yang menghasilkan sampah telah membawa dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan kurangnya pengelolaan yang komprehensif dan terpadu untuk memberikan manfaat ekonomi, kesehatan, dan keselamatan lingkungan, serta untuk mengubah perilaku masyarakat (Finamore et al., 2021)

Meskipun sampah dapat menjadi solusi jika dikelola dengan baik sesuai dengan manajemen sampah, namun dapat menjadi masalah jika manajemennya kurang baik, yang menghasilkan dampak lingkungan yang tidak sehat. Masalah sampah masih menjadi perhatian di banyak kota di Indonesia dan mengalami kendala dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan kebijakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

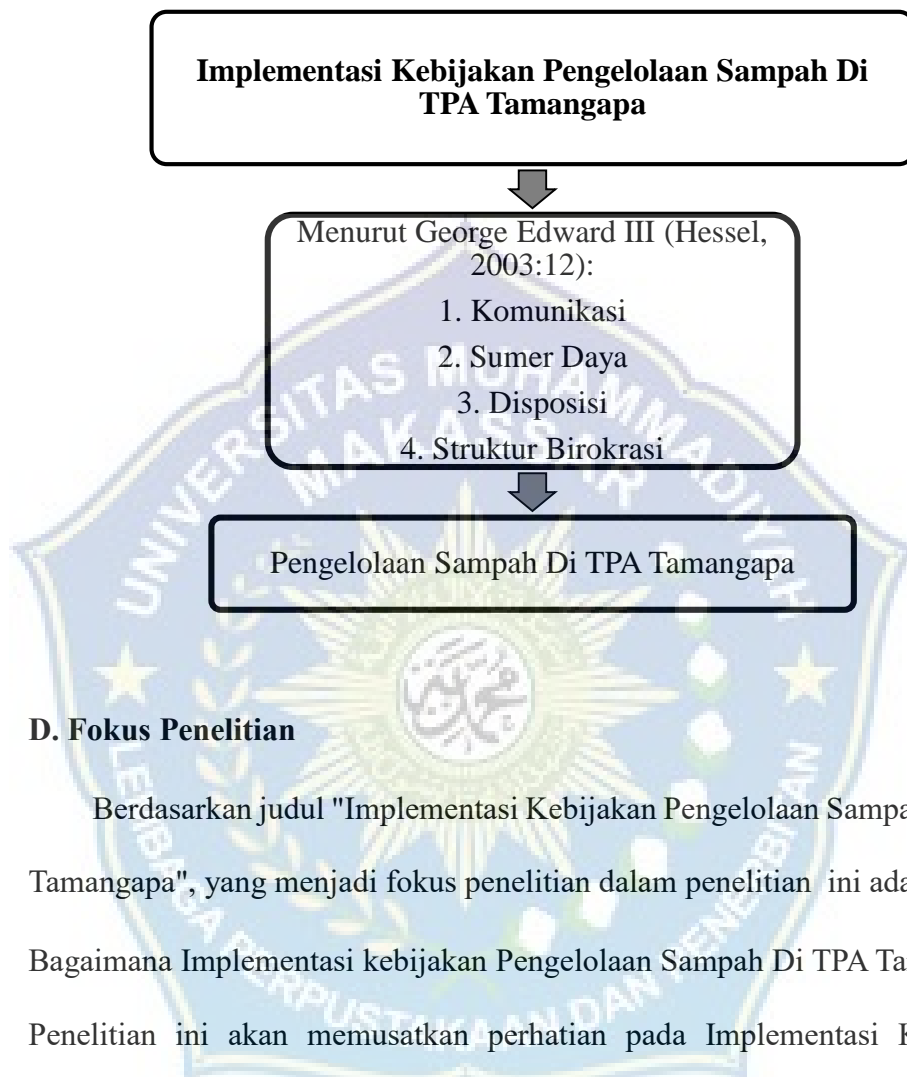
Dalam mengatasi masalah sampah, diperlukan tindakan konkret dari semua pihak. Upaya pemerintah dalam menggalakkan prinsip eco-living, seperti kebijakan penggunaan kantong belanja dan kemasan produk ramah lingkungan, serta praktik 3R (reduce, reuse, recycle), telah menunjukkan adanya upaya dalam pengelolaan sampah, meskipun perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Sampah dianggap sebagai sumber daya yang dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran.

Menurut teori dari George C. Edward III (dalam Riant Nugroho, 2009), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

### C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa", yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang diterapkan Di TPA Tamangapa

### E. Deskripsi Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian yang telah ditentukan dan yang akan menjadi gambaran dari penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa. adalah sebagai berikut;

### 1. Komunikasi

Dalam konteks "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa," komunikasi memegang peranan krusial. Komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat esensial untuk menjamin pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Ini termasuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, metode yang digunakan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Sumber Daya

Berdasarkan judul " Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa," sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi dan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga kerja terampil dan manajemen yang kompeten, sumber daya finansial untuk mendukung operasional dan inisiatif pengelolaan sampah, serta sumber daya teknologi yang mencakup peralatan dan infrastruktur untuk pengumpulan, pemrosesan, dan daur ulang sampah. Selain itu, sumber daya informasi dan edukasi juga vital dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

### 3. Disposisi

Dalam konteks " Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa," konsep disposisi sangat relevan, terutama dalam hal bagaimana sampah ditangani dan dieliminasi. Disposisi sampah di Kota



Makassar melibatkan proses dan metode yang digunakan untuk mengelola akhir dari siklus hidup sampah, yang bisa termasuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Efektivitas disposisi ini penting untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air, serta mengurangi risiko kesehatan bagi masyarakat.

#### 4. Struktur Birokrasi

Analisis Berdasarkan judul " Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa," struktur birokrasi memiliki peran penting dalam implementasi dan pengelolaan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi di Kota Makassar, yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan departemen, bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan eksekusi kebijakan pengelolaan sampah. Struktur ini harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengelolaan sampah, namun juga cukup kuat untuk menjamin konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan. Mulai dari 25 mei s/d 25 juli.. Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Kota Makassar tepatnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa Antang Kota Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa,

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka melainkan data yang berasal dari wawancara lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu menggambarkan realita ” Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa”.

##### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **D. Informan Penelitian**

Menurut Moleong (2006;132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian." Selain itu Andi (2010;147) dalam buku Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa, "Informan adalah orang yang diperkirakan

menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.” (Moha, 2015)

Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Table 3.1 Informan

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Kahfiani S.Hut	Kepala bidang persampahan dinas lingkungan hidup kota makassar
2	Nasrun S.E	Kepala PTU TPA Tamangapa Antang kota makassar
3	Angga	Masyarakat sekitar daerah TPA Tamangapa Antang Kota Makassar

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan dengan wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi seperti situasi dan kondisi agar dapat mengetahui bagaimana keadaan yang

sebenarnya. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung berkaitan dengan analisis kebijakan pengelolaan sampah di kota makassar: tinjauan dampak lingkungan dan Masyarakat

## 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi adalah recoder hasil wawancara dan foto para informan.

## F. Teknik Pengabsahan Data

Dalam pengabsahan data dari peneliti ini ialah triangulasi. Menurut William Wierseme. Triangulasi dalam penelitian ini dapat diartikan menjadi suatu proses pemeriksaan data dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan melalui berbagai cara dan juga berbagai data yang dilalui. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang didapatkan dari sebagian sumber. Terkait dengan hal ini peneliti mengadakan pengumpulan dan pengujian data dimana data atau dokumen didapat dengan melewati berbagai hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mencocokkan beberapa data dimana data tersebut berasal dari sumber yang serupa dengan cara berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dilihat

dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan beberapa jumlah, dengan kata lain seperti gaya percobaan kredibilitas data tersebut menciptakan sebuah informasi berbeda, untuk meyakinkan data yang mana merupakan data yang benar maupun bisa jadi seluruhnya benar dikatakan terlihat oleh faktor yang berbeda-beda.

### 3. Triangulasi Waktu

Dimana data yang diperoleh oleh narasumber bermacam dan berbeda pula serta dikumpulkan dengan metode mewawancarai narasumber di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan informasi yang akurat agar informasi tersebut semakin meyakinkan. Sehingga pada saat pengetasan kredibilitas dapat menggunakan metode wawancara, observasi atau teknik lainnya sesuai dengan kondisi dan waktu yang berbeda-beda.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah cara peneliti mengelola data yang dikumpulkan untuk membuat kesimpulan penelitian, karena informasi yang diperoleh karena informasi dari peneliti tidak dapat diperoleh. Dengan demikian, analisis data menjadi bagian yang sangat penting metode ilmiah, karena menanalisis data ini bisa lebih dalam pemecahan masalah yang signifikan dan bermakna. Mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, reduksi data adalah proses penyusunan data berdasarkan yang diperoleh dengan mereduksi, merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari konsep, tema dan kategori tertentu dari data.

2. Penyajian data, menyajikan data dengan mengkategorikan menurut pokok permasalahan yang dilakukan dalam bentuk matriks, hubungan antar pola dan sebagainya.
3. Pengumpulan dan verifikasi, dengan menggambarkan atau memverifikasi data yang akan diinterpretasi dalam narasi kualitatif untuk kemudian melakukan penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data tersebut.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah di Kota Makassar telah menjadi isu yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kota Makassar memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan di kota tersebut. Kinerja pengelolaan sampah oleh DLH di Kota Makassar telah menjadi sorotan sejumlah aktivis.

##### **a. Visi dan Misi:**

Visi DLH Kota Makassar adalah "Mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang Berwawasan Lingkungan".

##### **b. Misi DLH Kota Makassar meliputi:**

Meningkatkan kualitas teknis aparatur Badan Lingkungan Hidup Daerah yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental, spiritual, keterampilan, serta sarana dan prasarana.

Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.



Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

c. Struktur Organisasi:

- 1) DLH Kota Makassar terbagi dalam tipe A, yang terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang.
- 2) Struktur organisasi DLH Kota Makassar ditetapkan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

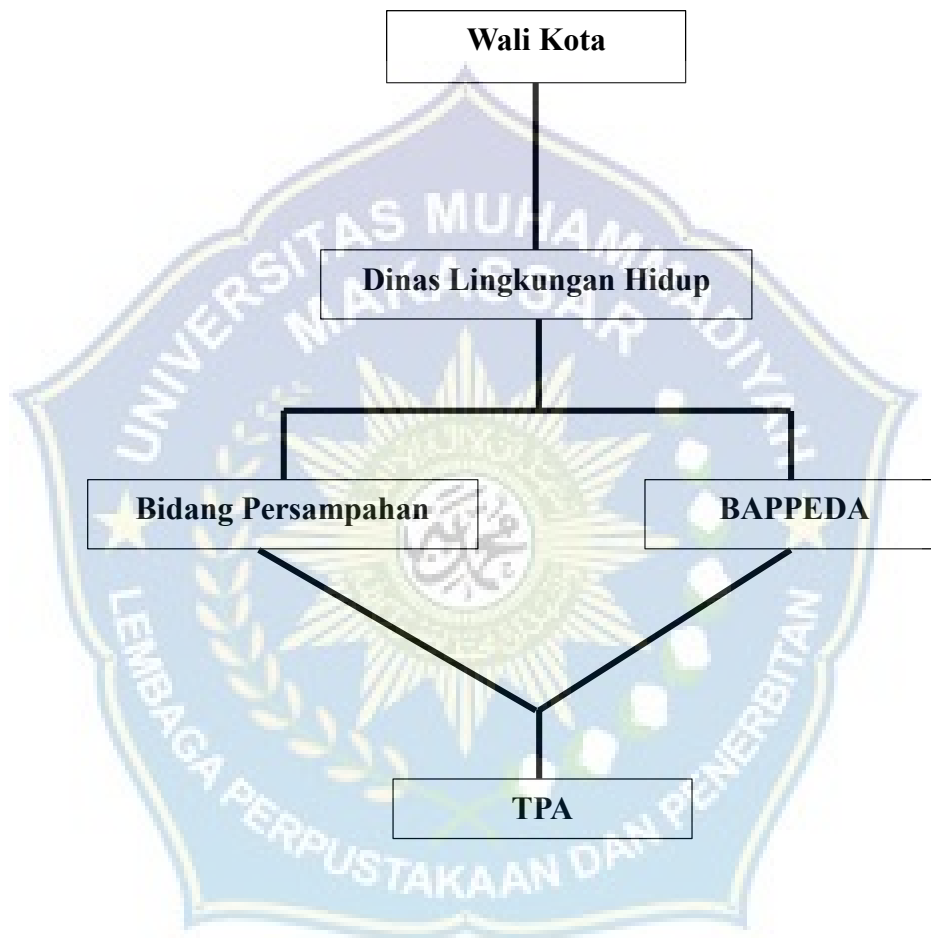
d. Pelayanan

- 1) Pelayanan pengujian sampel di laboratorium DLH Kota Makassar.
- 2) Pembelian sampah anorganik Bank Sampah Unit di Makassar.
- 3) Penjemputan sampah anorganik Bank Sampah Unit di Makassar.
- 4) Kegiatan pelayanan angkutan jenazah Kota Makassar.
- 5) Pos pengaduan dan pelayanan penanganan sengketa lingkungan hidup (P3SLH) Kota Makassar.
- 6) Surat izin pemakaman.

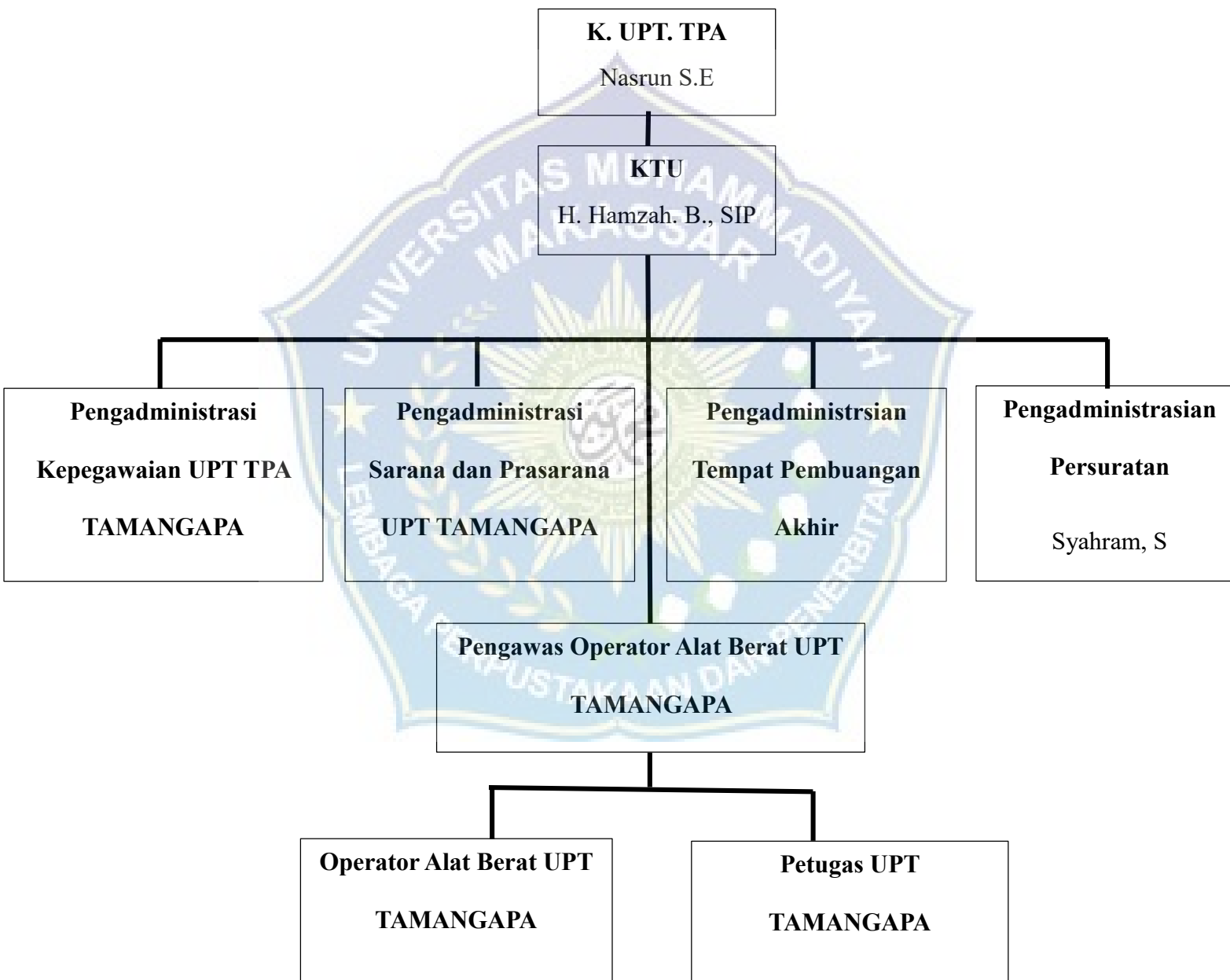
## 2. Struktural Organisasi

Gambar 4.1

### Struktur Borokrasi Pengolahan Sampah Kota Makassar



Gambar 4.2

**Struktur Kepegawaian UPT TPA TAMANGAPA**

Tabel 4.1 penduduk kelurahan Tamangapa

<b>Kelurahan Tamangapa</b>	
Luas	1,50 km <sup>2</sup>
Jumlah Penduduk	10.993 jiwa
Jumlah RT	33
Jumlah RW	7
Jumlah penduduk yang tinggal di sekitar TPA	122 Jiwa

Tabel 4.2 Data Volume sampah yang masuk 3 tahun terakhir

No	Tahun	Volume sampah masuk (kg)		
		Total volume	Rata-rata	Rata-rata
		kg	bulanan	harian
1	2021	279.955.867	23.329.656	767.002
2	2022	274.912.294	22.909.358	753.184
3	2023	313.826.100	26.152.175	859.798

## B. Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian selama kurang lebih 2 bulan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan TPA Antang Kota Makassar. Peneliti menemukan data – data yang berhubungan dengan judul penelitian ini, data diperoleh melalui observasi langsung ke Dinas lingkungan hidup dan TPA

Antang, kemudian wawancara yang mendalam kepada informan yang bersangkutan

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa**

Sistem Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Selain itu, tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi sarang penyakit dan menurunkan kualitas hidup Masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

#### **1. komunikasi**

Komunikasi yang efektif dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, Masyarakat dan pengelola sampah di TPA.

Komunikasi memainkan peran sentral dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola sampah menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mengatasi permasalahan sampah dengan optimal dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA Antang. Kahfiani S.Hut Sebagai kepala bidang persampahan menyampaikan mengenai komunikasi antara pemerintah kota dan masyarakat dalam

menyampaikan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar tepatnya di TPA Antang.

“Dinas Lingkungan Hidup rutin melaksanakan rapat koordinasi dengan kecamatan dalam hal ini kasi kebersihan yang dimana ada sosialisasi lewat Banner, di radio, dan media-media sosial , serta penempatan motivator serta penyuluh di tiap kecamatan yg setiap bulannya melaporkan proses serta progres kunjungan”(K, 25 mei 2024)

Dari wawancara di atas menjelaskan komunikasi antara pemerintah kota dan Masyarakat dalam menyampaikan kebijakan pengelolaan sampah di kota makassar tepatnya di TPA Antang bahwa Dinas Lingkungan Hidup sering melakukan rapat koordinasi setiap kecamatan untuk menyampaikan kebijakan pengelolaan sampah, selain itu juga media komunikasi pun di gunakan dalam melakukan penyebaran informasi kebijakan tersebut seperti media-media social, radio dan banner. Serta keterlibatan aktif motivator dan penyuluh juga digunakan agar Masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan.

Masyarakat sekitar juga memiliki peran penting dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Angga salah satu Masyarakat di Kota Makassar bertanggung mengenai informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah di kota makassar.

“Ya, saya merasa cukup mendapatkan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Informasi tersebut biasanya saya dapatkan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota di balai warga, serta dari media sosial resmi pemerintah kota yang sering mengupdate kebijakan dan program-program terbaru”(A, 24 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Upaya pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah di kota makassar. Masyarakat merasa cukup mendapatkan informasi yang diperlukan, yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah kota sudah cukup baik Namun, penting untuk terus memantau dan memastikan bahwa informasi ini tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak aktif di media sosial atau Masyarakat yang jarang mendatangi penyuluhan pemerintah.

Nasrun S.E sebagai kepala PTU TPA Antang menjelaskan mengenai proses komunikasi antara pengelola TPA Antang dengan pemerintah kota dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah

“pengelola TPA Antang hanya mengikuti kebijakan yang di keluarkan dinas lingkungan hidup”(N, 24 Juli 2024)

Dari hasil wawancara diatas Nasrun S.E sebagai kepala PTU TPA Antang menjelaskan bahwa komunikasi antara Dinas lingkungan Hidup dengan TPA Antang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Antang yaitu dari pihak TPA Antang hanya menjalankan yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait kebijakan pengolahan sampah itu sendiri.

Saluran komunikasi adalah elemen kunci dalam analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar, terutama dalam tinjauan dampak lingkungan pada masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, informasi

dapat disampaikan, kesadaran dapat ditingkatkan, partisipasi dapat digerakkan, dan umpan balik dapat diperoleh. Semua ini berkontribusi pada keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khfiani S.Hut selaku kepala dinas bidang persampahan menjelaskan mengenai bagaimana pemerintah memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah tersebut dapat tersampaikan oleh semua lapisan Masyarakat.

“untuk memastikan bagaimana kebijakan pengolahan sampah itu tersampaikan oleh masyarakat secara efektif kami dari dinas lingkungan hidup itu sendiri selain menyebar luaskan ke media-media komunikasi juga mempunyai motivator bank sampah di tiap kecamatan, selain itu ada juga dua lingkungan, serta anggota pakkandatto sebanyak 152 orang untuk menyebarkan informasi kebijakan pengolahan sampah tersebut”(K, 25 Mei 2024)

Dari wawancara di atas Rismawati selaku kepala dinas bidang persampahan menjelaskan bahwa untuk memastikan informasi kebijakan pengolahan sampah itu tersampaikan secara efektif ada begitu banyak cara yang dilakukan dari menyebar luaskan menggunakan media-media komunikasi hingga melibatkan motivator bank sampah yang dimana bertugas untuk mengedukasi, menginspirasi dan memotivasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih baik, selain itu ada juga duta lingkungan yang bertugas sebagai Meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan Tindakan terkait pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah, serta ada juga anggota- anggota pakkandatto mereka adalah Pasukan Penindakan



Anti Kotor yang dimana mereka bertugas membantu menyadarkan Masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar.

Memahami dampak lingkungan dan kesejahteraan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang buruk sangat penting bagi masyarakat karena berbagai alasan. Ketika masyarakat menyadari betapa besar pengaruh sampah terhadap lingkungan dan kesehatan mereka, mereka lebih cenderung untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan proaktif. Angga sebagai Masyarakat makassar yang mewakili Masyarakat dalam hal ini menjelaskan mengenai sejauh mana Masyarakat memahami dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di kota makassar.

“yah kami Masyarakat tau betul dampak buruk Ketika kita tidak peduli dengan sampah, makanya itu kami usahakan di sini untuk bisa mendaur ulang sampah, memanfaatkan sampah-sampah di sekitar. Apa lagi kita tinggal di TPA Antang toh, dekat dengan sampah yah pasti harus peka sama sampah disekitar, walaupun dekat dan tinggal dengan sampah tapi harus tetap peduli dengan sampah”(A, 24 Juli 2024)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa Masyarakat sekitar TPA Antang memahami bagaimana dampak buruk Ketika tidak Masyarakat tidak peduli dengan lingkungan seperti buang sampah sembarangan, membuang sampah di got dan lain-lain. Walaupun merka tinggal dekat dengan TPA namun mereka sangat peduli terhadap sampah, karena mereka sangat paham bahwa penumpukan sampah itu akan menyebabkan dampak lingkungan yang tidak baik.

program atau inisiatif khusus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik adalah elemen kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku, dan melibatkan masyarakat, program-program ini dapat membawa perubahan positif yang signifikan. Nasrun S.E selaku ketua PTU TPA Antang menjelaskan mengenai hal yang dilakukan dalam menyadarkan Masyarakat sekitar antang dalam pengelolaan sampah

“untuk menyadarkan Masyarakat sekitar antang makanya kita himbau, mereka silahkan mencari keberlangsungan hidup disini dan mereka juga tidak mengganggu aktivitas kita dalam pengelolaan sampah, misalnya Ketika ada kendaraan masuk biarkan saja jangan di haling-halangi, artinya antara kami dan masyarakat disini menyatu dan kami juga mendukung apa yang mereka lakukan selagi tidak mengganggu aktivitas kami”(N, 24 Juli 2024)

Dari wawancara di atas Nasrun S.E menjelaskan bahwa dalam menyadarkan Masyarakat di sekitar TPA Antang dengan cara mendukung apa yang mereka lakukan seperti Ketika bekerja memungut botol-botol sampah dan lain-lain mereka asalkan mereka juga tidak mengganggu aktivitas pekerja di TPA Antang.

## 2. Sumber Daya

Hubungan antara sumber daya dan analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar sangat penting dalam konteks dampak lingkungan pada masyarakat. Pengelolaan yang baik dari sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan informasi dapat mendukung implementasi

kebijakan yang efektif dalam mengelola sampah dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis kebijakan yang komprehensif harus mempertimbangkan semua aspek ini untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa tenaga kerjanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola sampah, seperti yang disampaikan Kahfiani selaku kepala bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

“dinas kami telah melaksanakan workshop2 pengelolaan sampah, pengelolaan RTH, dan pelatihan operator alat berat serta sosialisasi Di 300 perusahaan di kota Makassar”(K, 25 Mei 2024)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DLH Kota Makassar telah aktif dalam melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan dan kesadaran lingkungan di berbagai sektor masyarakat dan industri. Inisiatif ini mencakup edukasi, pelatihan, dan sosialisasi untuk mengubah perilaku dan praktik dalam mengelola sampah, merawat ruang terbuka hijau, mengelola infrastruktur, serta mematuhi regulasi lingkungan.

Maksud dari wawancara tersebut adalah untuk mengkomunikasikan upaya konkret yang telah dilakukan oleh DLH dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup di Kota Makassar. Melalui workshop, pelatihan, dan sosialisasi, DLH berharap dapat menciptakan

lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk masyarakat Kota Makassar secara keseluruhan.

Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat lebih mudah untuk membuang sampah mereka dengan cara yang teratur dan tidak sembarangan. Hal ini tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga mendukung pemilahan dan daur ulang sampah, yang penting untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, fasilitas yang memadai membantu mematuhi peraturan lokal mengenai pengelolaan sampah dan memastikan bahwa proses ini dilakukan secara efisien, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“kalo dibidang fasilitas di daerah sekitar TPA tamangapa seperti alat berat yang saya tahu hanya sedikit seperti buldozernya 1 Dan 2 Eksafator.dan kalo tempat-tempat sampah seperti yang kita bilang mungkin memang tidak ada karena kita sudah tinggal dengan sampah dan kalo mau buang sampah yah di tempatnya. Tapi kalau mau di tanya persoalan tempat sampah atau fasilitas sampah di sekitar kota makassar, yah kalo saya lihat kurang yah. Banyak ku lihat biasa mereka setiap rumah hanya membungkus sampahnya saja terus siman di depan rumah saja”(A, 24 Juli 2024)

Dari hasil wawancara tersebut angga sebagai Masyarakat menjelaskan bahwa fasilitas yang ada di TPA Tamangapaseperti alat berat hanya beberapa saja seperti 1 bulldazer dan 2 eskafator, kemudian angga juga menjelaskan mengenai fasilitas seperti tempat sampah yang ada di sekitar kota makassar, biasanya dia melihat rata-rata rumah hanya menyimpan sampah rumah tangganya didepan rumahnya saja sampai truk sampah mengambil sampah itu, tanpa mengetahui dan khawatir sampah tersebut akan berserakan dan menyebabkan dampak lingkungan. .

SDM merupakan tulang punggung dari pengelolaan sampah yang efektif di TPA Antang. Tanpa SDM yang kompeten dan berdedikasi, upaya untuk mengelola sampah secara efisien dan menjaga lingkungan yang bersih akan sangat sulit tercapai. Tanpa SDM yang tepat, upaya untuk mengelola sampah dan menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan akan sangat sulit tercapai. Nasrun S.E Sebagai kepala PTU TPA tamangapa menjelaskan mengenai Seberapa sering tpa tamangapa menghadapi kendala terkait sumber daya

“sebenarnya sih sering, yang namanya kendala sdm seperti ini khususnya dipengolahan lindi itu kan butuh ilmu untuk pendidikan, bukan cuman teori tapi harus memang ada ilmunya biar tau bagaimana mengelola lindi. Kami mempunyai penampungan dibawah yang jaraknya kurang lebih 200 m dari sini dan itu harus mempunyai sdm yang betul-betul paham bagaimana mekanisme pengelolaan air lindi ini yang mengalir ke sana”(N, 24 Juli 2024)

Hasil wawancara ini menyoroti bahwa kendala utama dalam pengelolaan sampah di TPA terkait dengan air lindi adalah kekurangan SDM yang terlatih dan berpendidikan. Meskipun fasilitas fisik untuk pengelolaan air lindi tersedia, efektivitas pengelolaannya sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilan SDM. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan SDM menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan air lindi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar lingkungan yang diharapkan.

Dengan SDM yang kompeten, TPA dapat mengelola air lindi secara efisien, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan meningkatkan keseluruhan efektivitas pengelolaan sampah.

Analisis kebijakan pengelolaan sampah harus mempertimbangkan bagaimana kapasitas tenaga kerja dapat diperkuat dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Tinjauan dampak lingkungan pada masyarakat harus mencakup penilaian terhadap efektivitas tenaga kerja dalam mengelola sampah dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Seperti yang di sampaikan Kahfiani S.Hut selaku ketua bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup

“ Sebagian besar pegawai DLH telah mengikuti sertifikasi amdal, yang dimana AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan “(K, 25 Mei 2024)

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa Rismawati sebagai sebagai ketua Bidang persampahan menyampaikan bahwa untuk memperkuat dan memanfaatkan kapasitas tenaga kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar DLH telah mengikuti sertifikat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sertifikat AMDAL adalah proses yang bertujuan untuk menilai dan mengelola dampak lingkungan dari berbagai proyek atau kegiatan. Dengan sertifikat ini, pegawai DLH memiliki kemampuan untuk memahami, menilai, dan mengelola dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pengelolaan sampah.

Sumber daya tenaga kerja yang efektif merupakan komponen vital dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Tenaga kerja yang terampil, berkompeten, dan berdedikasi tinggi mampu memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pemrosesan dan daur ulang, dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Dalam konteks ini, tenaga kerja tidak hanya sekadar pelaksana, tetapi juga agen perubahan yang dapat mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Angga menjelaskan mengenai hal itu

“yang saya lihat semua disini bekerja sesuai dengan topoksinya masing-masing, maksudnya mereka bekerja yahs esuai kemampuannya, mungkin yang jadi masalah biasanya kan karena kita tinggal di pembuangan sampah pasti banyak lalat, nah biasanya untuk mengurangi itu petugas sampah mereka tutupi dengan tanah biar tidak ada bau, dan banyak lalat. Tapi itu biasanya tidak bertahan lama artinya kan ini petugas saya rasa masi kurang teratur lah dalam menangani itu. Mungkin karena kurang itu tadi kurang banyak alat berat atau apakah saya juga kurang tau.”(A, 24 Juli 2024)

Dari hasil wawancara tersebut angga sebagai Masyarakat yang tinggal di daerah sekitar TPA menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di mana petugas bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah banyaknya lalat dan bau yang berasal dari tumpukan sampah. Untuk mengatasi ini, petugas biasanya menutupi sampah dengan tanah guna mengurangi bau dan menghalangi lalat. Namun, solusi ini hanya bersifat sementara karena bau dan lalat kembali muncul setelah beberapa waktu. Hal ini menunjukkan bahwa penutupan sampah dengan tanah kurang teratur dan



konsisten. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan alat berat dan peralatan yang memadai untuk melakukan penanganan sampah secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan keteraturan dalam pengelolaan sampah, serta penambahan jumlah dan kualitas alat berat, sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kemudian bantuan dari pemerintah dalam bentuk sumber daya untuk pengelolaan di tempat pembuangan Akhir (TPA) sangat penting, karena bantuan dari pemerintah atau pihak lain tidak hanya menyediakan sumber daya yang diperlukan tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan bantuan yang tepat, TPA dapat berfungsi lebih efisien, mengurangi dampak negative terhadap lingkungan, dan Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Kepala pengelola TPA Tamangapa menjelaskan mengenai hal tersebut.

“banyak, misalnya musim hujan kemudian polusi udara itu tinggi dan ingin kita benahi terkadang kita meminta bantuan dari skpd lain misalnya pemadam untuk melakukan penyiraman dicampur kemudian ada juga swasta yang membantu kita memberikan exoenzimnya mencampurkan kedalam tangki itu untuk menyiram yang dilakukan secara rutin 6 bulan sekali”(N, 24 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta, dalam mengelola sampah dan mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Keterlibatan berbagai pihak ini membantu memastikan bahwa masalah yang timbul, terutama pada saat-saat kritis seperti musim hujan dan ketika polusi udara tinggi, dapat ditangani dengan lebih efektif.



### 3. Disposisi

Disposisi mengacu pada proses akhir dalam siklus hidup sampah, mencakup metode dan teknik yang digunakan untuk menangani, mengolah, dan membuang sampah. Tahapan ini sangat krusial karena menentukan bagaimana sampah yang telah dikumpulkan dan diangkut akan dikelola lebih lanjut untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan perkotaan. Di Kota Makassar, upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah terus dilakukan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Salah satu langkah penting dalam rangkaian proses ini adalah pemilahan sampah. Pemilahan sampah merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan seluruh sistem pengelolaan sampah, karena pemisahan yang tepat dapat memudahkan pengolahan dan pembuangan akhir, serta mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Proses pemilahan sampah dilakukan di Kota Makassar, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Pemilahan sampah tidak hanya melibatkan teknologi dan infrastruktur yang memadai, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memisahkan sampah dari sumbernya sangat menentukan keberhasilan

kebijakan pengelolaan sampah yang telah dirancang. Seperti yang dikatakan oleh Kahfiani mengenai proses pemilihan sampah di Kota Makassar

“Pemilahan sampah di Kota Makassar dilakukan melalui program-program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya. DLH telah menyediakan fasilitas pemilahan di beberapa titik pengumpulan sampah dan mendorong masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Melalui kerja sama dengan RT/RW dan komunitas lokal, partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah semakin meningkat”(K, 25 Mei 2024)

Berdasarkan wawancara di atas menjeaskan bahwa pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar, yang melibatkan edukasi, sosialisasi, penyediaan fasilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar memiliki beberapa kepentingan yang sangat penting, baik dari segi lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun ekonomi kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga membantu memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara efisien, dan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Angga sebagai Masyarakat sekitar daerah TPA Tamangapa mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang di terapkan oleh pemerintah kota Makassar.

“menurut saya, yang saya lihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu masih ada sampah yang berserakan baik di pinggir jalan, siring, got, atau bahkan di median jalan hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum terimplementasikan dengan baik, sebab sampah yang masih saja berserakan disebabkan oleh masih ada masyarakat yang enggan menuruti aturan yang dijalankan dengan tidak, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan”(A, 24 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa meskipun ada kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem pengelolaan sampah agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai dengan lebih baik.

Disposisi pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sangat penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah. disposisi pengelola TPA yang baik adalah kunci untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Ini tidak hanya membantu mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

“Menurut saya, disposisi pengelola TPA Antang dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah menunjukkan adanya komitmen yang kuat, namun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek misalnya dukungan yang lebih lanjut, perbaikan yang mendalam, dan kesadaran juga terhadap sesama masyarakat”(N, 24 Juli 2024)

hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan dari pengelola TPA Antang dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Dukungan yang lebih kuat, perbaikan sistem yang mendalam, dan

peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkotaan. Di Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses pengumpulan dan pengangkutan sampah berjalan dengan lancar dan efisien. Efektivitas dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kahfiani S.Hut menjelaskan mengenai efektivitas pengelolaan sampah yaitu

“DLH telah mengimplementasikan jadwal pengumpulan sampah yang teratur dan menyeluruh di seluruh wilayah Kota Makassar. Selain itu, armada pengangkut sampah telah ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Teknologi GPS juga digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan rute pengangkutan sampah, sehingga pengumpulan sampah dapat dilakukan lebih efisien dan tepat waktu”(K, 25 Mei 2024)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa DLH Kota Makassar telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengangkutan sampah. Melalui penerapan jadwal yang teratur, peningkatan armada, dan penggunaan teknologi GPS, DLH berupaya untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kinerja pengelolaan sampah tetapi juga berkontribusi pada kebersihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, beberapa langkah utama perlu diterapkan. Pertama, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran melalui kampanye intensif dan program edukasi di sekolah, serta pelatihan praktis mengenai pengelolaan sampah. Kedua, penyediaan fasilitas yang memadai seperti tempat sampah di lokasi strategis dan pusat daur ulang harus diperbaiki untuk mempermudah pembuangan sampah dengan benar. Ketiga, penegakan hukum yang jelas dan sanksi bagi pelanggar sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah. Langkah-langkah ini secara keseluruhan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Angga sebagai Masyarakat menjelaskan mengenai peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

“menurut saya sangat perlu Meningkatkan partisipasi Masyarakat, dikarenakan partisipasi Masyarakat merupakan salah satu bentuk perubahan yang sangat signifikan dan berpengaruh dalam aspek lingkungan. Kesadaran Masyarakat seharusnya lebih ditingkatkan lagi agar lingkungan di kota makassar ini juga minimal meningkat 20 persen”(A, 24 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Masyarakat sangat mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai cara untuk mencapai perubahan signifikan dalam lingkungan. Mereka percaya bahwa partisipasi aktif dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah dan perbaikan kondisi lingkungan di Kota Makassar. Penekanan pada target

peningkatan lingkungan sebesar 20 persen menunjukkan adanya harapan untuk hasil yang konkret dan terukur dari upaya tersebut.

Dengan memahami dan menanggapi masukan dan keluhan masyarakat secara efektif, pengelola TPA dapat meningkatkan kualitas layanan, mengurangi dampak lingkungan, membangun kepercayaan, memperkuat partisipasi masyarakat, mencegah konflik, dan memastikan kepatuhan regulasi. Ini adalah bagian penting dari pengelolaan TPA yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nasrun S.E menjelaskan mengenai sikap Ketika ada keluhan Masyarakat yang masuk.

“kalau di sekitar TPA tidak ada Masyarakat yang mengeluh karena dia lebih banyak menghasilkan dari TPA daripada kerugian yang mereka dapatkan. Karena di TPA ini fasilitasnya lengkap ada sekolah, puskesmas, paud, masjid, dan taman baca”(N, 24 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pengelola TPA percaya bahwa dengan menyediakan berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar TPA, mereka dapat mengurangi atau menghilangkan keluhan masyarakat. Menyediakan fasilitas seperti sekolah, puskesmas, PAUD, masjid, dan taman baca tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan persepsi positif terhadap TPA. Dalam konteks ini, fasilitas-fasilitas tersebut menjadi alat penting dalam memastikan bahwa operasional TPA diterima dengan baik oleh masyarakat dan mengurangi potensi keluhan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan publik, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan dan program dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah, struktur birokrasi tidak hanya menentukan bagaimana perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan, tetapi juga bagaimana koordinasi dan pengawasan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal.

Di Kota Makassar, struktur birokrasi yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan departemen memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola kebijakan pengelolaan sampah. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan struktur birokrasi untuk merencanakan, mengawasi, dan mengeksekusi kebijakan dengan efektif, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik dari berbagai wilayah kota.

Struktur birokrasi di Kota Makassar berperan penting dalam mendukung perencanaan kebijakan pengelolaan sampah dengan menyediakan kerangka kerja yang terkoordinasi, memastikan data yang akurat, dan mengembangkan kebijakan serta program yang sesuai dengan kebutuhan kota. Koordinasi yang efektif antara berbagai departemen dan tingkatan pemerintahan memastikan bahwa kebijakan dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara komprehensif, dengan memperhatikan semua aspek yang mempengaruhi pengelolaan sampah di kota. Kahfiani S.Hut sebagai



kepala bidang Persampahan menjelaskan mengenai struktur birokrasi di Kota Makassar mendukung perencanaan kebijakan pengelolaan sampah

“Struktur birokrasi di Kota Makassar mendukung perencanaan kebijakan pengelolaan sampah dengan melibatkan berbagai departemen yang bertanggung jawab atas aspek yang berbeda dari pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyusun rencana strategis yang komprehensif. Rencana ini mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan pengembangan program-program yang diperlukan untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah”(K, 25 Mei 2024)

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa Struktur birokrasi di Kota Makassar, melalui kolaborasi antara DLH dan Bappeda, mendukung perencanaan kebijakan pengelolaan sampah dengan menyusun rencana strategis yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan pengembangan program-program yang komprehensif. Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga terintegrasi dengan rencana pembangunan kota secara keseluruhan, memungkinkan pencapaian tujuan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan sistem pengelolaan sampah berfungsi dengan efektif. Struktur birokrasi yang baik bertanggung jawab untuk merancang, menerapkan, dan memantau kebijakan pengelolaan sampah, memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik dari pengumpulan hingga proses daur ulang.



Angga sebagai Masyarakat menjelaskan mengenai birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

“menurut saya birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar belum sepenuhnya efektif. Meskipun terdapat kebijakan dan upaya dari pemerintah, masih ada tantangan besar dalam implementasinya. Misalnya, masih banyak sampah yang berserakan di berbagai tempat, seperti pinggir jalan dan got, yang menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya diterapkan”(A, 24 Juli 2024)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar belum sepenuhnya efektif. Menurut Angga, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan dan melakukan berbagai upaya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu indikasi dari ketidakefektifan birokrasi adalah masih banyaknya sampah yang berserakan di berbagai lokasi seperti pinggir jalan dan got. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum diterapkan secara optimal atau ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, meskipun ada struktur dan kebijakan yang dirancang untuk pengelolaan sampah, proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi masalah sampah secara efektif.

Hubungan yang erat antara pengelola TPA Antang dan birokrasi pemerintah kota sangat penting untuk efektivitas pengelolaan sampah. Koordinasi yang baik antara keduanya memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat diterapkan dengan konsisten di lapangan. Birokrasi pemerintah kota berperan dalam penyediaan sumber daya, seperti anggaran dan peralatan, yang mendukung operasional TPA. Hubungan yang

efektif juga memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang lebih efisien terhadap kinerja TPA, serta penanganan masalah dan tantangan yang muncul dalam proses pengelolaan sampah. Nasrun S.E menjelaskan mengenai hubungan pelola TPA Tamangapa dengan birokrasi pemerintah kota dalam pengelolaan sampah.

“semua OPD pada saat kami membutuhkan misalnya dalam hal pemilihan adipura seperti tahun lalu semua OPD yang ada di kota makassar hadir di sini memberikan kontribusi, masukan apapun yang kita mau benahi misalnya kami butuh pengaspalan pimpinan langsung menyurat ke PU, PU datang”(N, 24 Juli 2024)

Hasil wawancara dengan Nasrun S.E menunjukkan bahwa hubungan antara pengelola TPA Tamangapa dan birokrasi pemerintah kota sangatlah efektif, terutama dalam konteks kebutuhan operasional dan dukungan. Nasrun menjelaskan bahwa dalam situasi khusus seperti pemilihan Adipura, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar berperan aktif dengan memberikan kontribusi dan masukan. Ketika TPA Tamangapa membutuhkan perbaikan atau dukungan spesifik, seperti pengaspalan, pimpinan langsung mengajukan permohonan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dukungan ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik dan responsif antara pengelola TPA dan birokrasi pemerintah kota, yang memastikan bahwa kebutuhan operasional TPA dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, hubungan yang erat ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan sehari-hari, tetapi juga dalam situasi-situasi penting yang memerlukan kerjasama lintas lembaga.

Fleksibilitas dalam struktur birokrasi merupakan elemen kunci yang berkontribusi pada efektivitas pengelolaan sampah di Kota Makassar. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah, struktur birokrasi yang fleksibel memungkinkan adaptasi dan respons yang cepat terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan yang muncul. Fleksibilitas ini penting untuk menangani dinamika pengelolaan sampah yang kompleks, termasuk variasi dalam volume sampah, perubahan dalam kebiasaan masyarakat, serta perkembangan teknologi dan kebijakan. Seperti yang di jelaskan Kepala bidang persampahan

“Fleksibilitas dalam struktur birokrasi memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Misalnya, jika ada peningkatan volume sampah di suatu area, DLH dapat segera mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke area tersebut. Fleksibilitas ini juga memungkinkan inovasi dalam metode pengelolaan sampah, seperti penerapan teknologi baru atau program edukasi yang lebih efektif”(K, 25 Mei 2024)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Fleksibilitas dalam struktur birokrasi di Kota Makassar berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Kemampuan untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan kondisi, menerapkan inovasi, dan menyesuaikan kebijakan serta program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan data terbaru membantu menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Fleksibilitas ini memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat dijalankan secara efisien, responsif, dan berkelanjutan.

Pandangan mengenai transparansi dan akuntabilitas birokrasi dalam pengelolaan sampah sangat penting karena keduanya memainkan peran krusial dalam memastikan efektivitas dan integritas sistem. Transparansi membantu membangun kepercayaan publik dengan memastikan bahwa proses pengelolaan sampah dilakukan secara terbuka dan informasi mengenai penggunaan sumber daya dan anggaran dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini juga meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kemungkinan pemborosan atau penyalahgunaan sumber daya, karena adanya pengawasan publik yang aktif. Angga menjelaskan hal tersebut

“menurut saya Pandangan mengenai transparansi dan akuntabilitas birokrasi dalam pengelolaan sampah sering kali mencakup beberapa aspek penting. Transparansi dalam birokrasi berarti bahwa proses dan keputusan terkait pengelolaan sampah dilakukan dengan jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana keputusan diambil dan bagaimana sumber daya digunakan. Akuntabilitas, di sisi lain, mengacu pada tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa mereka dapat dipertanggungjawabkan atas hasil kerja mereka”(A, 24 Juli 2024)

Hasil wawancara tersebut menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pengelolaan sampah. Menurut pandangan yang diungkapkan, transparansi dalam birokrasi berarti bahwa semua proses dan keputusan terkait pengelolaan sampah harus dilakukan secara terbuka dan jelas. Ini memastikan bahwa masyarakat dapat memahami bagaimana keputusan diambil dan bagaimana sumber daya digunakan, yang pada gilirannya membangun kepercayaan publik. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas mereka, memastikan bahwa mereka dapat dipertanggungjawabkan atas hasil kerja

mereka. Dengan kata lain, akuntabilitas memastikan bahwa pejabat birokrasi bertanggung jawab atas kinerja mereka dan bahwa ada mekanisme untuk mengevaluasi dan menilai hasil kerja mereka. Secara keseluruhan, kedua aspek ini—transparansi dan akuntabilitas—adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah berfungsi dengan efektif dan adil, mengurangi risiko pemborosan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh birokrasi.

Menghadapi tantangan birokrasi dalam menjalankan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Hambatan birokrasi, seperti perizinan yang rumit atau koordinasi yang tidak efisien antar lembaga, dapat menghambat kelancaran operasional TPA, menyebabkan pemborosan sumber daya, dan mempengaruhi kualitas layanan. Dengan mengatasi tantangan ini, pengelola TPA dapat memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, sehingga menghindari sanksi hukum dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

“terkadang yang sering kami hadapi misalnya kalau hari libur alat berat itukan kami tidak tau apalagi TPA Antang inikan kita bergantung pada alat berat, kalau hari libur sabtu minggu kadang kita terkendala ada alat berat rusak dan alat perbaikannya bukan di kami ada di UPD lain, nah Ketika libur, kadang kami dapat masalahnya disitu tetapi bukan berarti kami tidak mencari Solusi, tetapi kami mencari anggota yang memiliki keahlian dan kalaupun memang mampu nanti dia berkoordinasi dengan UPD yang berkaitan dengan perbaikan alat berat”(N, 24 Juli 2024)

Hasil wawancara tersebut menggambarkan tantangan birokrasi yang dihadapi dalam operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, khususnya terkait dengan pengelolaan alat berat. Saat hari libur seperti Sabtu dan Minggu, masalah sering timbul ketika alat berat mengalami kerusakan, karena alat perbaikan dan wewenang perbaikan berada pada Unit Pelaksana Dinas (UPD) lain. Tantangan ini menghambat kelancaran operasional TPA karena ketergantungan yang tinggi pada alat berat untuk pengelolaan sampah. Meskipun demikian, pengelola TPA tidak tinggal diam; mereka mencari solusi dengan melibatkan anggota yang memiliki keahlian dalam perbaikan alat berat. Anggota ini kemudian berkoordinasi dengan UPD terkait untuk memastikan perbaikan alat berat dapat dilakukan meskipun pada hari libur. Ini menunjukkan adanya upaya proaktif dari pengelola TPA untuk mengatasi hambatan birokrasi demi memastikan operasional TPA tetap berjalan lancar dan efektif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang efektif adalah elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Melalui komunikasi yang baik, kebijakan dapat dipahami dan diadopsi oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pengelola TPA.

Tiga indikator utama yang mendukung keberhasilan komunikasi dalam kebijakan ini adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Proses

penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat dan pihak terkait harus berjalan lancar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 11: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 24: Pemerintah daerah wajib menyediakan media informasi yang memadai untuk menyampaikan kebijakan, peraturan, dan informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Dengan transmisi yang baik, kebijakan dapat diterima oleh semua pihak, mulai dari pemerintah, pengelola TPA, hingga masyarakat umum. Dalam konteks ini, transmisi informasi dilakukan melalui berbagai media seperti banner, radio, dan media sosial, yang semuanya memastikan bahwa pesan kebijakan tersebar luas dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kejelasan informasi memastikan bahwa masyarakat memahami kebijakan yang berlaku dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar secara rutin melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi untuk memastikan bahwa



kebijakan pengelolaan sampah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam wawancara dengan Rismawati, Kepala Bidang Persampahan, dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar rutin melakukan rapat koordinasi dengan kecamatan, menggunakan berbagai media komunikasi seperti banner, radio, dan media sosial, serta melibatkan motivator dan penyuluh di setiap kecamatan untuk menyampaikan kebijakan pengelolaan sampah. Strategi ini memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mendukung kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat adalah aspek penting dalam kebijakan pengelolaan sampah. Dari wawancara dengan Angga, salah satu warga Makassar, terungkap bahwa masyarakat merasa cukup mendapatkan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota di balai warga dan media sosial resmi pemerintah kota. Meskipun demikian, pemerintah kota perlu terus memantau dan memastikan bahwa informasi ini tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak aktif di media sosial atau jarang mengikuti penyuluhan pemerintah.



Nasrun S.E., Kepala PTU TPA Tamangapa, menyatakan bahwa pengelola TPA Tamangapa hanya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola TPA adalah kunci untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah dapat diterapkan dengan konsisten dan efektif di lapangan. Tantangan birokrasi, seperti perizinan yang rumit atau koordinasi yang tidak efisien antar lembaga, dapat menghambat kelancaran operasional TPA. Namun, dengan mengatasi tantangan ini, pengelola TPA dapat memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

★ Konsistensi dalam komunikasi memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak berubah-ubah dan tetap relevan sepanjang waktu. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan dari masyarakat serta pihak terkait lainnya. Pengelola TPA, seperti yang disampaikan oleh Nasrun S.E., mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa konsistensi dalam komunikasi antara pemerintah dan pengelola TPA sangat penting untuk memastikan operasional yang efektif dan sesuai dengan kebijakan.

Pandangan mengenai transparansi dan akuntabilitas birokrasi dalam pengelolaan sampah sangat penting karena keduanya memainkan peran krusial dalam memastikan efektivitas dan integritas sistem. Transparansi

membantu membangun kepercayaan publik dengan memastikan bahwa proses pengelolaan sampah dilakukan secara terbuka dan informasi mengenai penggunaan sumber daya dan anggaran dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini juga meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kemungkinan pemborosan atau penyalahgunaan sumber daya. Akuntabilitas memastikan bahwa birokrasi bertanggung jawab atas hasil kerja mereka dan dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja mereka.

Kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang buruk sangat penting. Angga, seorang warga Makassar, menjelaskan bahwa masyarakat di sekitar TPA Antang memahami betul dampak buruk jika tidak peduli terhadap sampah. Meskipun tinggal dekat dengan TPA, mereka tetap peduli terhadap pengelolaan sampah dengan berusaha mendaur ulang sampah dan memanfaatkan sampah di sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.

Program atau inisiatif khusus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik adalah elemen kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Nasrun S.E. menjelaskan bahwa untuk menyadarkan masyarakat sekitar TPA Antang, pihak TPA mendukung apa yang dilakukan masyarakat seperti memungut botol-botol sampah asalkan tidak mengganggu aktivitas pekerja

di TPA. Inisiatif semacam ini dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam pengelolaan sampah dan kesejahteraan lingkungan.

Menurut William N. Dunn (2000), analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu analisis kebijakan prospektif, retrospektif, dan terintegrasi. Dalam penelitian ini analisis kebijakan yang dipakai adalah analisis kebijakan retrospektif yang dimana analisis kebijakan retrospektif adalah Analisis ini dilakukan setelah aksi kebijakan telah dilakukan. Melibatkan penciptaan dan transformasi informasi berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Tiga kelompok analis yang terlibat dalam jenis analisis ini adalah kelompok berorientasi disiplin, kelompok berorientasi masalah, dan kelompok berorientasi aplikasi. Tiga kelompok tersebut yaitu

a. Kelompok Berorientasi Disiplin

Akademisi dan Peneliti: Mereka melakukan studi dan analisis mendalam berdasarkan disiplin ilmu tertentu, seperti ilmu lingkungan, kebijakan publik, atau manajemen sampah. Mereka mengumpulkan data dan mengembangkan teori atau model untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah.

b. Kelompok Berorientasi Masalah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Bidang Persampahan: Mereka fokus pada pemecahan masalah spesifik yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Misalnya, Lukman dan timnya yang rutin melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan melalui berbagai

media komunikasi untuk memastikan kebijakan dipahami dan diadopsi oleh masyarakat.

c. Kelompok Berorientasi Aplikasi

Pengelola TPA dan Masyarakat: Kelompok ini terlibat langsung dalam penerapan kebijakan di lapangan. Nasrun S.E., sebagai Kepala PTU TPA Antang, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan cara memungut dan mendaur ulang sampah, merupakan bagian dari kelompok ini. Mereka menerapkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah, serta beradaptasi dengan kondisi nyata di lapangan.

Keterlibatan ketiga kelompok ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat dievaluasi, dipahami, diadopsi, dan diterapkan dengan efektif, serta mampu membawa perubahan positif dalam manajemen sampah dan lingkungan.

2. Sumber daya

Pengelolaan sampah di Kota Makassar menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12: Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 16: Pemerintah daerah harus memastikan

bahwa petugas pengelola sampah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai melalui pelatihan dan pendidikan. penting untuk memastikan bahwa petugas pengelola sampah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai melalui pelatihan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar telah aktif mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas SDM, namun masih ada kebutuhan untuk pelatihan yang lebih spesifik seperti pengelolaan air lindi, seperti diungkapkan oleh Nasrun S.E., Kepala PTU TPA Tamangapa.

Kebijakan ini menekankan pentingnya penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pengelolaan sampah. Pelatihan dan pendidikan bagi petugas pengelola sampah juga merupakan aspek penting untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang cukup untuk pengelolaan sampah yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Makassar masih membutuhkan perbaikan dalam banyak aspek, terutama terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan teknologi.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan tulang punggung pengelolaan sampah yang efektif. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas

SDM melalui workshop, pelatihan, dan sosialisasi. Kahfiani, Kepala Bidang Persampahan DLH, menyatakan bahwa dinasnya aktif mengadakan pelatihan pengelolaan sampah dan operator alat berat, serta sosialisasi di berbagai perusahaan di kota Makassar. Informasi yang akurat dan jelas mengenai kebijakan pengelolaan sampah harus disediakan dan disebarluaskan oleh pemerintah. Ini termasuk penyampaian informasi melalui media komunikasi seperti banner, radio, dan media sosial untuk memastikan masyarakat memahami dan mendukung kebijakan yang ada. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam mengelola sampah.

Namun, wawancara dengan Nasrun S.E, Kepala PTU TPA Tamangapa, mengungkapkan bahwa kendala terkait SDM masih sering terjadi, terutama dalam pengelolaan air lindi yang memerlukan pengetahuan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan sudah dilakukan, masih ada kebutuhan untuk peningkatan kompetensi yang lebih spesifik dan mendalam. Wewenang yang jelas antara pemerintah daerah dan pengelola TPA sangat penting untuk implementasi kebijakan yang konsisten. Pengelola TPA mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara efektif.

Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk pengelolaan sampah yang efektif. Angga, seorang warga yang tinggal di sekitar TPA Tamangapa, menjelaskan bahwa fasilitas di TPA masih terbatas, dengan

hanya beberapa alat berat seperti satu bulldozer dan dua ekskavator. Selain itu, fasilitas tempat sampah di sekitar kota Makassar juga kurang memadai, menyebabkan sampah rumah tangga seringkali hanya diletakkan di depan rumah hingga diambil oleh truk sampah. Keterbatasan ini mengakibatkan pengelolaan sampah yang kurang teratur dan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Infrastruktur dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk pengelolaan sampah yang efektif. Undang-Undang mengamanatkan penyediaan fasilitas untuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah. Namun, keterbatasan fasilitas di TPA Tamangapa dan kekurangan tempat sampah di kota menyebabkan pengelolaan sampah yang kurang optimal dan meningkatkan risiko pencemaran.

Pengelolaan sampah yang tidak optimal berdampak langsung pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Masalah seperti bau dan lalat yang berasal dari tumpukan sampah di TPA menjadi keluhan utama warga sekitar. Upaya seperti menutup sampah dengan tanah hanya memberikan solusi sementara. Kolaborasi dengan instansi lain, seperti pemadam kebakaran untuk penyiraman dan perusahaan swasta untuk penyediaan eksosenzim, dilakukan untuk mengatasi polusi udara terutama saat musim hujan. Namun, tindakan ini belum cukup untuk memberikan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.



Seperti yang dikatakan oleh (Haerul et al., 2016) masalah sampah di Kota Makassar menjadi permasalahan yang belum dapat sepenuhnya diatasi oleh pemerintah daerah, dan solusi jangka panjang yang tepat masih belum ditemukan oleh karena itu kebijakan pengelolaan sampah yang komprehensif harus mempertimbangkan semua aspek yang telah disebutkan di atas. Dukungan dari pemerintah dan kolaborasi dengan sektor swasta sangat penting. Pemerintah Kota Makassar perlu memastikan bahwa regulasi yang ada dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh infrastruktur serta sumber daya yang memadai. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu diedukasi dan dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat

### 3. Disposisi

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan perkotaan. Di Kota Makassar, upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah terus dilakukan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Disposisi sampah, atau proses akhir dalam siklus hidup sampah, mencakup metode dan teknik yang digunakan untuk menangani, mengolah, dan membuang sampah. Tahapan ini sangat krusial karena menentukan bagaimana sampah yang telah dikumpulkan dan diangkut akan dikelola lebih lanjut untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.



Menurut (Danang Aji Kurniawan & Ahmad Zaenal Santoso, 2021) Pengelolaan sampah merupakan kunci penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan lestari serta menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari oleh karena itu proses pemilahan sampah merupakan tahap awal yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah. Pemilahan yang tepat dapat memudahkan pengolahan dan pembuangan akhir, serta mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Pemilahan sampah di Kota Makassar dilakukan melalui program-program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya. DLH telah menyediakan fasilitas pemilahan di beberapa titik pengumpulan sampah dan mendorong masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Melalui kerja sama dengan RT/RW dan komunitas lokal, partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah semakin meningkat. Seperti yang dikatakan oleh Kahfiani S.Hut, pendekatan holistik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar melibatkan edukasi, sosialisasi, penyediaan fasilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat, Pengangkatan dan penempatan birokrat yang kompeten di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pengelola TPA adalah kunci. Seperti yang dijelaskan oleh Rismawati dan Kahfiani, penting untuk memiliki staf yang terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan sampah. Dukungan birokrasi yang efektif dapat memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, termasuk pemilahan sampah dari sumbernya dan pengaturan jadwal pengumpulan yang teratur..

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 14: Pemerintah daerah harus melakukan pemilahan sampah dari sumbernya untuk memudahkan pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 10: Pemerintah daerah harus mengimplementasikan jadwal pengumpulan sampah yang teratur dan menyeluruh serta memastikan pengangkutan sampah dilakukan secara efisien dan tepat waktu.

Kebijakan disposisi sampah mencakup pemilahan sampah dari sumbernya dan pengaturan jadwal pengumpulan sampah yang efisien. Pemilahan sampah di sumber memudahkan pengolahan lebih lanjut dan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Jadwal pengumpulan yang teratur memastikan bahwa sampah dapat diangkut dan dikelola dengan baik, mengurangi risiko pencemaran lingkungan.

Kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar memiliki beberapa kepentingan yang sangat penting, baik dari segi lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun ekonomi. Angga, seorang warga sekitar TPA Tamangapa, mengungkapkan bahwa meskipun ada kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Sampah yang berserakan di pinggir jalan, siring, got, atau bahkan di median jalan

menunjukkan bahwa kebijakan belum terimplementasikan dengan baik, karena masih ada masyarakat yang enggan menuruti aturan dengan tidak membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Insentif bagi masyarakat dan pihak terkait sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Makassar menerapkan berbagai program edukasi dan sosialisasi untuk memotivasi masyarakat dalam memilah sampah dan mengikuti jadwal pengumpulan. Insentif ini dapat berupa dukungan fasilitas, pelatihan, atau penghargaan bagi mereka yang berpartisipasi aktif.

Disposisi pengelola TPA sangat penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah. Nasrun S.E, Kepala PTU TPA Tamangapa, menyatakan bahwa pengelolaan TPA memerlukan perbaikan di beberapa aspek, termasuk dukungan lebih lanjut, perbaikan mendalam, dan peningkatan kesadaran terhadap sesama masyarakat. Dukungan dari pemerintah dan pihak lain, serta kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta, dalam mengelola sampah dan mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Efektivitas dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kahfiani S.Hut menjelaskan bahwa DLH Kota Makassar telah mengimplementasikan

jadwal pengumpulan sampah yang teratur dan menyeluruh di seluruh wilayah Kota Makassar. Selain itu, armada pengangkut sampah telah ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Teknologi GPS juga digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan rute pengangkutan sampah, sehingga pengumpulan sampah dapat dilakukan lebih efisien dan tepat waktu. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya signifikan untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kebijakan disposisi mencakup pemilahan sampah, jadwal pengumpulan yang efisien, dan fasilitas yang memadai. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah menekankan pentingnya pemilahan sampah untuk memudahkan pengolahan dan mengurangi volume yang masuk ke TPA. DLH telah menyediakan fasilitas pemilahan dan armada pengangkut sampah yang ditingkatkan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah diatur dengan kebijakan yang lebih umum dan tidak spesifik. Regulasi terkait pengelolaan sampah cenderung tidak ada atau sangat terbatas, sehingga sering kali pengelolaan tidak terkoordinasi dengan baik. Sebelumnya, program pendidikan dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh serta kebijakan pengelolaan sampah lebih banyak berfokus pada aspek pengumpulan dan pembuangan tanpa adanya integrasi yang mendalam

dalam pengolahan dan daur ulang.. Masyarakat mungkin kurang sadar akan pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai perubahan signifikan dalam lingkungan. Angka menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat agar lingkungan di Kota Makassar meningkat minimal 20 persen. Partisipasi aktif dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah dan perbaikan kondisi lingkungan di Kota Makassar.

Meskipun kebijakan telah diterapkan, tantangan seperti sampah yang berserakan dan kurangnya kesadaran masyarakat masih ada. Nasrun S.E. menekankan perlunya dukungan lebih lanjut dan perbaikan mendalam dalam pengelolaan TPA. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan mencapai pengelolaan sampah yang efektif.

#### 4. Birokrasi

Pengelolaan sampah di Kota Makassar merupakan salah satu aspek kritical dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan perkotaan. Melalui berbagai inisiatif dan kebijakan, pemerintah Kota Makassar berupaya untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah dengan melibatkan struktur birokrasi yang kompleks, teknologi yang tepat, serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  
Pasal 19: Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan adanya koordinasi yang baik antar lembaga dan dinas terkait untuk pengelolaan sampah yang efektif. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 5: Pemerintah pusat dan daerah harus membentuk tim koordinasi pengelolaan sampah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Kebijakan ini menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga dan dinas terkait untuk pengelolaan sampah yang efektif. Struktur birokrasi yang mendukung perencanaan kebijakan dan pelaksanaan program-program pengelolaan sampah harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan di lapangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pengelolaan sampah juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dan integritas sistem, serta membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, struktur birokrasi yang ada harus memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat diterapkan dengan konsisten di lapangan. Kahfiani, Kepala Bidang Persampahan, menyebutkan bahwa struktur birokrasi mendukung perencanaan kebijakan dengan menyusun rencana strategis, namun, tantangan dalam implementasi masih ada, seperti

yang diungkapkan oleh Angga yang menyebutkan adanya sampah berserakan yang menunjukkan ketidakefektifan implementasi.

Implementasi kebijakan, menurut Van Horn dan Van Meter seperti yang dikutip oleh Wahab dalam (Mokodompis et al., 2019), dapat dijelaskan sebagai proses tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok dari pemerintah atau sektor swasta. Tindakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dalam hal ini peneliti meneliti Struktur birokrasi yang dimana memegang peran fundamental dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah dilaksanakan dengan efektif. Di Kota Makassar, struktur birokrasi melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan departemen, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kolaborasi antar departemen ini esensial dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Bapak Lukman, kepala bidang persampahan, menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang ada mendukung perencanaan kebijakan dengan menyusun rencana strategis yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan pengembangan program-program yang diperlukan untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah.

Namun, meskipun struktur birokrasi yang ada telah dirancang untuk mendukung pengelolaan sampah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Angga, seorang warga Kota Makassar,



birokrasi dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan masih banyaknya sampah yang berserakan di berbagai lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, pelaksanaannya belum optimal atau ada kekurangan dalam pengawasan dan eksekusi di lapangan.

Hubungan yang erat antara pengelola TPA Antang dan birokrasi pemerintah kota sangat penting untuk efektivitas pengelolaan sampah. Koordinasi yang baik memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat diterapkan dengan konsisten. Nasrun S.E., seorang pengelola TPA Tamangapa, menyoroti bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar berperan aktif dalam mendukung operasional TPA, terutama dalam situasi khusus seperti pemilihan Adipura. Dukungan ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik dan responsif antara pengelola TPA dan birokrasi pemerintah kota, yang memastikan bahwa kebutuhan operasional TPA dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat.

Fleksibilitas dalam struktur birokrasi memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan yang muncul di lapangan. Hal ini penting untuk menangani dinamika pengelolaan sampah yang kompleks. Kepala bidang persampahan menjelaskan bahwa fleksibilitas ini memungkinkan DLH untuk mengalokasikan sumber daya tambahan ke area yang membutuhkan serta menerapkan inovasi dalam



metode pengelolaan sampah, seperti penerapan teknologi baru atau program edukasi yang lebih efektif.

Transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pengelolaan sampah sangat penting untuk memastikan efektivitas dan integritas sistem. Menurut Angga, transparansi dalam birokrasi berarti bahwa proses dan keputusan terkait pengelolaan sampah harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana keputusan diambil dan bagaimana sumber daya digunakan. Akuntabilitas, di sisi lain, mengacu pada tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa mereka dapat dipertanggungjawabkan atas hasil kerja mereka. Kedua aspek ini adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah berfungsi dengan efektif dan adil, mengurangi risiko pemborosan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh birokrasi.

Menghadapi tantangan birokrasi dalam menjalankan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Hambatan birokrasi, seperti perizinan yang rumit atau koordinasi yang tidak efisien antar lembaga, dapat menghambat kelancaran operasional TPA. Nasrun S.E. mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah kerusakan alat berat pada hari libur, yang memerlukan koordinasi dengan UPD lain untuk perbaikan. Meskipun demikian, pengelola TPA berusaha mencari solusi

proaktif untuk mengatasi hambatan ini demi memastikan operasional TPA tetap berjalan lancar dan efektif



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah bergantung pada komunikasi yang efektif, struktur birokrasi yang efisien, dan partisipasi aktif masyarakat. Komunikasi yang baik, termasuk transmisi informasi yang lancar, kejelasan pesan, dan konsistensi, memastikan kebijakan dipahami dan diterima oleh semua pihak. Struktur birokrasi yang fleksibel dan transparan mendukung pelaksanaan kebijakan dengan koordinasi antar lembaga yang baik. Sementara itu, partisipasi masyarakat yang aktif dalam pemilahan dan pengelolaan sampah memperkuat implementasi kebijakan, mengurangi dampak lingkungan negatif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi melalui analisis kebijakan retrospektif menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai kelompok analis dalam proses ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan mengadaptasi kebijakan secara efektif.
2. pengelolaan sampah di Kota Makassar menghadapi tantangan signifikan yang melibatkan aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan teknologi. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif pelatihan dan sosialisasi, masih ada kebutuhan mendalam untuk peningkatan kompetensi khusus dan penyediaan fasilitas yang memadai, seperti alat berat

dan tempat sampah. Keterbatasan infrastruktur di TPA Tamangapa dan kurangnya fasilitas di tingkat kota berkontribusi pada pengelolaan sampah yang kurang optimal, yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan kebijakan yang komprehensif yang mengintegrasikan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta serta partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui kebijakan pemilahan, jadwal pengumpulan yang teratur, dan penyediaan fasilitas, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Pemilahan sampah yang dilakukan di sumbernya dan pengaturan jadwal pengumpulan yang efisien penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan meminimalkan dampak lingkungan. Namun, masalah seperti sampah yang berserakan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan infrastruktur yang terbatas masih menghambat hasil optimal. Dukungan lebih lanjut dari pemerintah, kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan elemen kunci untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Makassar.

4. meskipun ada berbagai kebijakan dan upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Kebijakan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga, fleksibilitas struktur birokrasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, struktur birokrasi di Kota Makassar menghadapi tantangan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan secara efektif. Masih banyak sampah yang berserakan, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan eksekusi di lapangan. Koordinasi yang baik antara pengelola TPA dan birokrasi pemerintah kota, serta fleksibilitas dalam penyesuaian kebijakan, adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Meskipun terdapat upaya perbaikan seperti penerapan teknologi baru dan program edukasi, efektivitas sistem pengelolaan sampah bergantung pada dukungan yang konsisten dari semua pihak terkait serta partisipasi aktif dari masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka terdapat saran ataupun masukan yang ingin penulis sampaikan, terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka terdapat saran ataupun masukan yang ingin penulis sampaikan, terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, sebagai berikut:

1. Buat Program intensif dan bentuk kelompok Masyarakat peduli sampah seperti bank sampah agar Masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam pengolahan sampah

2. Publikasikan laporan kinerja secara berkala dan lakukan audit independen terhadap pengelolaan sampah.
3. Berikan pelatihan bagi petugas sampah dan tingkatkan fasilitas pengelolaan sampah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal ...*
- Alam, S. (2019). Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan sebagai Sebuah Kajian Implementatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 81–96.
- Anugerah, M. F., & Yahya, M. R. (2022). ANALISIS RENCANA KEBIJAKAN AKSI BERSIH SAMPAH KOTA PEKANBARU. *JDP (JURNAL DINAMIKA ...*
- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 2(1), 17–37.
- Danang Aji Kurniawan, D. A. K., & Ahmad Zaenal Santoso, A. Z. S. (2021). Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–36.
- Danna, D. C., & Kismartini, K. (2021). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BATANG. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi ...*
- Fadliah, N., Parawu, H. E., & Makassar, U. M. (2021). *Implementasi Kebijakan Persampahan Berbasis*. 3, 104–114.
- Finamore, P. da S., Kós, R. S., Corrêa, J. C. F., D, Collange Grecco, L. A., De Freitas, T. B., Satie, J., Bagne, E., Oliveira, C. S. C. S., De Souza, D. R., Rezende, F. L., Duarte, N. de A. C. A. C. D. A. C., Grecco, L. A. C. A. C., Oliveira, C. S. C. S., Batista, K. G., Lopes, P. de O. B., Serradilha, S. M., Souza, G. A. F. de, Bella, G. P., ... Dodson, J. (2021). Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. Fitri, W. Y., Wibowo, A. W., & Ariyanto, D. B. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Daerah Utama Tujuan Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Fitriyarini N Nurliah, I. (2013). Pemberitaan dan Persepsi Masyarakat Tentang Lingkungan Hidup di Media Cetak Lokal Provinsi Kaltim. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK*, 11(1), 19–29.
- Hadomuan, M. T., & Tuti, R. W. D. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*.

- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Hansyar, R. M., & Halimah, H. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI SIGLI KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Sains Riset*.
- Iqbal, M., Mulyadin, R. M., Ariawan, K., & ... (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI DKI JAKARTA. ... *Analisis Kebijakan ...*
- Komarudin, A., Rosmajudi, A., Hilman, A., Sampah, P., & Tangga, R. (2023). *Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kecamatan indihiang kota tasikmalaya*. 3(4), 41–49.
- Listiyani, N. (2017). *DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN SELATAN DAN IMPLIKASINYA BAGI HAK-HAK WARGA NEGARA (Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens)*. 1(April), 67–86.
- Mahin, M. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH. In *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf .... jurnal.unka.ac.id*.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.
- Moha, D. S. & M. I. (2015). Ragam Penelitian Kualitatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Muhlis, M. F., Selinrung, M., & Syafri, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar: Studi Kasus Kecamatan Biringkanaya. ... *Regional Studies Journal*.
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 537–550. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>
- Pemikiran, J., Hukum, P., Kebijakan, I., Sampah, B., & Kecamatan, D. I. (2023). *Implementasi kebijakan bank sampah di kecamatan rappocini kota makassar*. 10, 87–94.
- Putra, W. T., & Ismaniar. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.37411/jjce.v1i2.569>
- Safitri, R. R. (2023). *Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang*



*Kota Makassar*. 118 Halaman.

SILAM, A. S. H. (2023). *EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALANGKA RAYA*. eprints.ipdn.ac.id.

Syalwa Jayantri, A., & Agung Rido, M. (2021). Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 147–159.

Tempat, D. I., Sampah, P., Bukit, T. P. S., Madani, M., Mustari, N., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH*. 4.

Wance, M. (2022). Quality of Community Waste Management Services in AmbonCity Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat di KotaAmbon. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(2), 587–598.

Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, V. K. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.



# LAMPIRAN







**Wawancara bersama Bapak Nasrun S.E sebagai Kepala PTU TPA Tamangapa**



**Wawancara bersama ibu Kahfiani S.Hut Kepala Dinas Bidang Persampahan**

**Dinas Lingkungan Hidup**





**Wawancara bersama Angga Sebagai Masyarakat sekitar TPA Tamangapa  
Antang Kota Makassar**



Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar  
Integrity · Professionalism · Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email: [fisip@uismuh.ac.id](mailto:fisip@uismuh.ac.id)  
Official Web: <https://fisip.uismuh.ac.id>

Nomor : 0490/FSP/A.6-VIII/I/1445H/2024 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :


Nama Mahasiswa : Rio  
Stambuk : 105641109020  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Di Dinas Lingkungan Hidup dan Tempat Pembuangan Akhir Antang Kota Makassar.  
Judul Skripsi : *"Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar (Tinjauan Dampak Lingkungan pada Masyarakat)"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 02 Mei 2024

Ketua Jurusan

  
**Ahmad Harakan, S.IP., M.HI**  
NBM : 1207 163



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia  
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
Public Administration - Government Studies - Communication Science



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 10714/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4194/05/C.4-VIII/N/1445/20224 tanggal 02 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : RIO  
Nomor Pokok : 105641109020  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR: (TINJAUAN DAMPAK LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 04 Mei s/d 04 Juni 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 04 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT 1  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.  
2. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rio  
Nim : 105641109020  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 09 Agustus 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)



Rio 105641109020 Bab I

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	6%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://bppd-makassar.e-journal.id">bppd-makassar.e-journal.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  Off

LULUS

turnitin

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	repo.apmd.ac.id Internet Source	4%
2	jurnal.itscience.org Internet Source	3%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unri.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Cendrawasih Student Paper	1%
7	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

105641109020 Bab III

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

3%

2

Dewi Hijriyani, Iriane Sosiawaty Ponto, La  
Madjid. "WASTE MANAGEMENT IN SAUMLAKI  
CITY, TANIMBAR ISLANDS REGENCY",  
PUBLICUS : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK,  
2024

Publication

2%



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 2%

105641109020 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Dewi Hijriyani, Iriane Soslawaty Ponto, La Madjid. "WASTE MANAGEMENT IN SAUMLAKI CITY, TANIMBAR ISLANDS REGENCY", PUBLICUS : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2024

Publication

2%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

o 105641109020 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

4%



turnitin

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Rio**, Lahir pada tanggal 22 Mei 2002 di desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Anak dari bapak Rustam B dan Ibu Marda yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis beragama Islam tinggal di Desa Lara. Penulis menempuh pendidikannya di Sekolah Dasar di SDN 045 Lara Utama, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Baebunta, setelah itu menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 7 Luwu Utara. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, mengambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada masa kuliah penulis aktif berlembaga di Himpunan Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP)